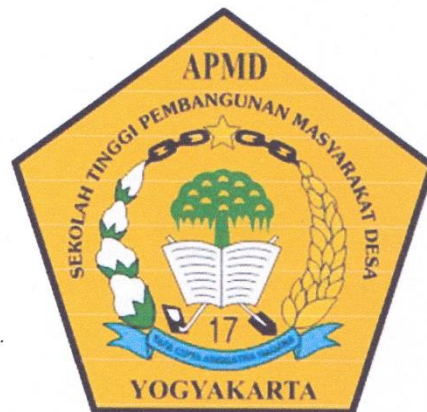


**PEMERINTAHAN PANDEMI**

*Studi tentang Relasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19  
di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta*

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**ERWIN SOVIANA SATRIANI**

**18520036**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**



**PEMERINTAHAN PANDEMI**

*Studi tentang Relasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19  
di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta*

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:  
**ERWIN SOVIANA SATRIANI**  
18520036

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan Tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar serjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Juli 2022  
Jam : 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta


### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si</u> Ketua /Pembimbing	
<u>Dr. Supardal, M.Si</u> Penguji I	
<u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.I.P., M.A.</u> Penguji II	

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Soviana Satriani

Nim : 18520036

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PEMERINTAHAN PANDEMI” Studi tentang Relasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang telah dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Yogyakarta, 02 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink is written over a 10,000 Rupiah stamp. The stamp is pink and white, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10.000', and 'METERAI TEMPEL'. Below the stamp, the name 'Erwin Soviana Satriani' is printed.

Erwin Soviana Satriani

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alkhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Skripsi dengan judul PEMERINTAHAN PANDEMI Studi tentang Relasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, Kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak pencerahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sampai selesainya skripsi ini. Dibimbing kurang lebih satu tahun berlalu merupakan sebuah kehormatan yang memberikan banyak hal bagi penulis: Keberanian membangun argumen, pemetaan perspektif, serta membimbing penulis dalam memastikan pintu masuk dan pintu keluar. Dan, pengalaman yang tidak kalah penting adalah mendudukkan ilmu yang ditempuh pada tempatnya serta proses memaknai setiap kata, tindakan dan perbuatan yang diambil.
2. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” yang telah membekali banyak pengetahuan dan menjadi teman diskusi penulis selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Pemerintah dan Masyarakat Kalurahan Lumbungrejo yang telah menjadi teman diskusi selama penulis melakukan penelitian.
4. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materil.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan banyak dukungan dan menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta. Jika saya harus mengulang kembali dari awal seluruh rangkaian proses perkuliahan ini, saya akan mengatakan dan bersaksi, bahwa tidak pernah menyesal telah menempuh pendidikan di Kampus yang tercinta ini. APMD mengajarkan banyak hal, termasuk memahami hajat hidup orang banyak secara utuh.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan skripsi, tidak luput dari kekurangan, kesulitan, dan hambatan, yang tentu pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak, Ibu Dosen beserta semua pihak atas segala bantuan moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wacana pemikiran bagi pihak yang berminat pada penelitian di bidang ini.

Yogyakarta, 12 Juli 2022

Penulis



Erwin Soviana Satriani



## **MOTTO**

Saya pernah malas dan saya rugi  
(*Erwin Soviana Satriani*)  
-\*\*-

Pakailah aku sebagai alatMu Tuhan  
(*Setyono*)

Jangan pernah meninggalkan sholat  
(*Sudarmi*)

Dunia sementara akhirat selamanya  
(*Wiwin Hindra Darmawan*)

Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya  
(*Heny Winarni*)

Take the risk or lose the chance  
(*Jasmine Az-zahra*)

Only I can call my dream useless  
(*Cahya Arie Nugroho*)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Ibu, ketulusanya dari hati atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang dan semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang, dan untuk almamater biru kebanggaanku.”



## **ABSTRACT**

*The outbreak of a new virus in early 2020 shocked the world, this virus is known as the Corona Virus (SARS-CoV) and the type of disease is called Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). The Covid-19 pandemic received special attention because the intensity of its spreading was very massive and caused many deaths. Countries around the world are trying to compete and challenge in efforts to deal with Covid-19. At the time of the Covid-19 pandemic, the characteristics of state power showed its true face in the name of the safety of the people, which was the supreme law as a security approach that led to the implementation of an emergency in which the lives of citizens had to be unconditionally subservient. In this case, of course, the function of a country's government in handling Covid-19 is very much needed. How has the Covid-19 pandemic shaped governments?*

*The researcher uses an interpretive research method with a qualitative approach, in this context the researcher will describe a special phenomenon and end up drawing general conclusions that produce new knowledge or novelty in this research. Data collection is collected through literature study and field study (observations, interviews, documentations). In this study, researchers describe a phenomenon that is an important feature of the pandemic government in Indonesia in handling Covid-19.*

*The description of the phenomenon of the pandemic government in Indonesia produces several characteristics, namely: First, the role of protection is the most important feature of the government. Second, the role of government is complemented by distribution and repression. However, in repression there is persuasion and negotiation. Third, village involvement because the village is one of the front lines in controlling the spreading of Covid-19. It should be noted that the participation of the village government and the participation and solidarity of the community are two forces that cannot be taken lightly. The emancipation of the village government is a distinctive feature that other nations do not have. Lumbungrejo Village is proof that the village has a big role in the government of the pandemic, besides that, Lumbungrejo Village also proves the relationship between the government and the community in the formation of a pandemic government in handling the Covid-19 pandemic in Indonesia.*

***Keywords: Government, Pandemic, Relations***

## INTISARI

Merebaknya virus baru di awal tahun 2020 menggemparkan dunia, virus ini dikenal dengan *Corona Virus* (SARS-CoV) dan jenis penyakit yang ditimbulkan disebut *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Pandemi Covid-19 mendapat perhatian khusus karena intensitas penyebarannya sangat masif dan menimbulkan banyaknya kematian. Negara-negara di dunia berusaha hadir berlomba dan bersaing dalam upaya penanganan Covid-19. Pada saat pandemi Covid-19 tersebut karakteristik kekuasaan negara menunjukkan wajah aslinya atas nama keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi sebagai pendekatan keamanan yang mengarah ke pemberlakuan keadaan darurat dimana kehidupan warga negara harus tunduk tanpa syarat. Dalam hal tersebut tentunya fungsi pemerintahan suatu negara dalam penanganan Covid-19 sangat dibutuhkan. Bagaimana pandemi Covid-19 membentuk pemerintahan?

Peneliti menggunakan metode penelitian *interpretatif* dengan pendekatan *kualitatif*, pada konteks ini peneliti akan menggambarkan fenomena khusus dan berakhir pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum yang menghasilkan pengetahuan baru atau *novelty* dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan fenomena yang menjadi fitur penting pada pemerintahan pandemi di Indonesia dalam penanganan Covid-19.

Gambaran fenomena pemerintahan pandemi di Indonesia menghasilkan beberapa karakteristik yaitu: Pertama, peran proteksi merupakan ciri pemerintah yang paling utama. Kedua, peran pemerintah dilengkapi dengan distribusi dan represif. Namun, dalam represif terdapat persuasi dan negosiasi. Ketiga, keterlibatan desa karena desa merupakan salah satu garda terdepan dalam mengontrol penyebaran Covid-19. Perlu diketahui bahwa emansipasi pemerintah desa dan partisipasi serta solidaritas masyarakat adalah dua kekuatan yang tidak bisa di anggap enteng. Emansipasi pemerintah desa menjadi ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kalurahan Lumbungrejo sebagai bukti bahwa desa mempunyai peran besar dalam pemerintahan pandemi, selain itu Kalurahan Lumbungrejo juga membuktikan adanya relasi antara pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

**Kata Kunci: Pemerintahan, Pandemi, Relasi**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
INTISARI .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual.....	13
1. Pandemi Bencana Darurat.....	13
2. Penanganan Covid-19.....	25
3. Ciri-ciri dan Fungsi Pemerintah.....	31
4. Solidaritas Masyarakat.....	35
5. Partisipasi Masyarakat.....	40
6. Pemerintah Desa .....	43
7. Emansipasi Pemerintah Desa.....	46
F. Metode Penelitian.....	48
1. Jenis Penelitian.....	48
2. Subjek Penelitian .....	49
3. Objek Penelitian.....	50
4. Fokus Penelitian .....	51

5. Pendekatan Penelitian .....	52
6. Sumber Data.....	52
7. Metode Pengumpulan Data.....	53
8. Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB II.....</b>	<b>57</b>
<b>PROFIL KALURAHAN LUMBUNGREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....</b>	<b>57</b>
A. Keadaan Geografi .....	57
B. Keadaan Demografi .....	59
C. Keadaan Sosial Ekonomi.....	65
D. Budaya .....	66
E. Pemerintahan .....	67
F. Sarana dan Prasarana .....	69
<b>BAB III.....</b>	<b>71</b>
<b>MASYARAKAT RISIKO .....</b>	<b>71</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>86</b>
<b>CIRI-CIRI PEMERINTAH.....</b>	<b>86</b>
<b>DALAM PERSPEKTIF INDONESIA KOMPARATIF .....</b>	<b>86</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>113</b>
<b>EMANSIPASI PEMERINTAH DESA .....</b>	<b>113</b>
<b>BAB VI.....</b>	<b>122</b>
<b>SOLIDARITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT .....</b>	<b>122</b>
A. Solidaritas Masyarakat.....	122
B. Partisipasi Masyarakat.....	127
<b>BAB VII .....</b>	<b>134</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan.....	134
B. Rekomendasi .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>143</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Daftar Subjek Penelitian .....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 2. 1 Data Kependudukan berdasar per Wilayah.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 2. 2 Data Kependudukan berdasar Pendidikan .....</b>	<b>60</b>
<b>Tabel 2. 3 Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 2. 4 Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabel 2. 5 Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo Tanggal 07 September 2021.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabel 2. 6 Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo Tanggal 30 September 2021.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 2. 7 Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo Tanggal 22 Februari 2022.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 2. 8 Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo .....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 2. 9 Daftar Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Lumbungrejo .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel 4. 1 Susunan Personalia Gugus Tugas/Relawan Desa Penanganan COVID-19 Kalurahan Lumbungrejo .....</b>	<b>104</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kalurahan Lumbungrejo .....</b>	<b>57</b>
<b>Gambar 2. 2 Peta Epidemiologi Covid-19 Kabupaten Sleman.....</b>	<b>59</b>
<b>Gambar 2. 3 Bagan Pamong Kalurahan Lumbungrejo .....</b>	<b>68</b>
<b>Gambar 2. 4 Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan .....</b>	<b>68</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. 1 Surat Ijin Penelitian.....	143
1. 2 Foto Penelitian.....	146



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Merebaknya virus baru diawal tahun 2020 menggemparkan dunia karena virus ini sangat mudah menular, virus ini dikenal *Corona Virus* (SARS-CoV) dan jenis penyakit yang ditimbulkan disebut *Corona Virus Disease 2019* disingkat Covid-19 (Yuliana, 2020). Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menular dan dapat menyebabkan penyakit ringan seperti pilek sampai penyakit serius seperti MERS dan SARS (Supardi dan Rahmad, 2020). WHO menyatakan bahwa Covid-19 menular melalui orang yang terinfeksi korona virus. Virus tersebut menyebar melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. Selanjutnya, droplet yang mengandung korona virus dapat mendarat dipermukaan benda yang mungkin disentuh oleh orang yang sehat. Jika di tangan orang yang sehat terdapat korona virus dan kemudian menyentuh hidung, mulut atau mata, maka orang tersebut akan terpapar korona virus. Korona virus itu sifatnya zoonotik yaitu penyakit pada hewan yang bisa menyebar ke manusia. Namun, pada SARS COV-2 bisa menular dari satu orang ke orang yang lainnya. Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Pada akhir desember tahun 2019 sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 237 negara yang telah terjangkit virus ini termasuk di Indonesia. Menurut data Worldometer per 18 Januari 2022 jumlah penderita terinfeksi Covid-19 mencapai 326.279.424. (Data WHO, 18 Januari 2022) (PDPI, 2020)

Pandemi Covid-19 juga telah merubah tatanan global dan hubungan internasional antar negara-negara di Dunia. Sejak kemunculannya pada Desember

2019 tersebut, virus ini langsung menjadi perhatian dunia. Sebab intensitas penyebarannya sangat masif dan mengakibatkan tingginya kematian di seluruh dunia. Dengan adanya pandemi Covid-19 banyak negara yang harus menutup wilayahnya. Aktivitas transportasi masuk hingga keluar ditutup dan pergerakan masyarakat pun dibatasi. Hubungan bilateral dan multilateral antar negara tak sedikit yang terganggu akibat pandemi Covid-19. Dengan adanya pandemi ini, negara di dunia mengalami perubahan khususnya politik global. Dinamika politik global saat pandemi yakni berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Politik global akibat pandemi menimbulkan persaingan antar negara di dunia dalam berlomba dan bersaing, yang salah satu contohnya adalah dalam menemukan vaksin Covid-19. Dinamika politik global yang terjadi di tengah pandemi harus diwaspadai oleh negara-negara dan hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. (MPR UNAS, 2020)

Politik Pandemi Covid-19 juga memunculkan beberapa konsentrasi dimana kekuasaan pemerintah/eksekutif memiliki peran besar tanpa ada pertimbangan dengan legislatif. Hal ini membawa krisis yang berbahaya dengan adanya pemerintah di seluruh dunia yang berusaha mengatasi pandemi dengan memperluas kekuatan dan kemampuan mereka. Menurut data Covid-19 *Digital Rights Tracker* dan *Civi Freedom Tracker*, sebanyak 32 negara menggunakan militer atau peraturan militer dalam menegakkan aturan. Seperti di Angola, polisi menembak dan membunuh beberapa warga negara saat pembatasan sosial. Negara juga memanfaatkan teknologi, terdapat 2 negara yang menggunakan *drone* sebagai pengintai. Hal ini dilakukan ketika pemerintah menerapkan kekuasaan darurat yang

dianggap sebagai pencegahan dalam persebaran Covid-19, namun yang dirasakan oleh masyarakat penerapan kekuasaan ini justru hanya untuk menguntungkan pemerintah daripada menyelamatkan nyawa manusia. (Kemp. L, 2021)

Keadaan politik pandemi ini memberi ancaman juga terhadap penurunan demokrasi dunia, terlihat dengan semakin banyaknya negara yang meluncur ke arah otoritarianisme. Terdapat juga peningkatan ancaman pada negara yang memiliki kehidupan demokrasi yang mapan. Penyebab merosotnya demokrasi meliputi kebijakan yang populis, penyalahgunaan kegiatan pembatasan pandemi Covid-19 untuk membungkam kritikus, kecenderungan pemerintahan di banyak negara untuk meniru perilaku anti-demokrasi di negara lain serta taktik disinformasi dalam memecah-belah masyarakat. (Reuters, 2021)

Penurunan demokrasi juga memunculkan pertanyaan akan teknokrasi dimana para ilmuwan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik. Selama pandemi Covid-19 ini para ilmuwan merasa tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan penanganan pandemi. Padahal Covid-19 merupakan fenomena yang bisa dan seharusnya diselesaikan dengan metode saintifik (Atmosuwito, 2020). Filsuf Giorgio Agamben baru-baru ini mengkritik reaksi yang berlebihan dalam penanganan pandemi Covid-19 dimana negara-negara di seluruh dunia telah menyatakan keadaan darurat perang melawan pandemi. Menurut Agamben, Covid-19 tidak terlalu berbeda dengan flu musiman. Kekhawatiran Agamben yaitu pemerintah menggunakan keadaan darurat sebagaimana menghadapi terorisme dan sebagai legitimasi melakukan tindakan “pengecualian” tanpa batas. Krisis ini mendapat kritik balik dari masyarakat. Giorgio Agamben telah mendiagnosis

praktik kontrol negara atas tubuh negara sebagai “paradigma biopolitik modern”, yakni “matriks tersembunyi” di balik topeng demokrasi liberal yang beradab. Namun, pada saat-saat darurat karakter kekuasaan negara modern cenderung menunjukkan wajah aslinya, yakni atas nama *salus populi suprema lex esto* (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi) untuk melakukan pendekatan keamanan yang mengarah ke pemberlakuan “keadaan darurat” dimana kehidupan warga negara harus tunduk tanpa syarat. (Putro, 2020)

Dalam penanganan Covid-19 ini terdapat varian fungsi pemerintah yang berbeda pada setiap negara yang berkaitan dengan bagaimana pemerintah menggunakan hukum terutama untuk menjalankan fungsi tersebut diatas fungsi pemerintah yang sedang berjalan. Menurut Adam Smith (1976) fungsi pemerintah suatu negara dibagi menjadi tiga fungsi pokok, yaitu memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri, menyelenggarakan peradilan, dan menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Adanya pandemi Covid-19 akhirnya terbentuklah formasi dari fungsi pemerintah tersebut. Pemerintah tetap sebagai institusi yang lebih aktif dan dinamis ketimbang negara. Formasi tradisi menurut Anglo-Saxon adalah rakyat-pemerintah-politik-administrasi-warga. Rakyat adalah pemegang kedaulatan yang memberi mandat kepada pemerintah, sehingga pemerintah adalah institusi representasi kedaulatan rakyat. Atas mandat rakyat dan atas dasar *rule of law*, pemerintah bekerja dengan politik dan administrasi untuk menjalankan fungsi regulasi, distribusi, proteksi dan koersi. (B.Guy Peters, 2019)

Pada hari Senin 27 Desember 2021, China melaporkan ada 182 kasus transmisi lokal dari 209 kasus baru. Kebanyakan kasus berada di Xi'an. Pemerintah setempat meminta 13 juta penduduknya untuk tidak keluar dari rumah mereka. Adanya penguncian wilayah ini ternyata berdampak bagi warga China. Warga setempat mengatakan mereka menghadapi kelaparan setelah mereka dilarang pergi keluar untuk mendapatkan makanan. Selain itu, mereka hanya diizinkan keluar dari rumah saat diundang untuk pengujian massal Covid-19, atau untuk keadaan darurat medis. Meski kasus Covid-19 cenderung lebih sedikit dibanding negara lainnya, tapi China menerapkan kontrol yang ketat. Tanpa memberikan dukungan logistik kepada warganya. (detikHealth, 2021)

Semenjak kebijakan *lockdown* diterapkan di Italia, kebijakan *lockdown* pun berhasil menekan pergerakan manusia turun sampai 40%. Banyak perusahaan memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah yang semakin membuat kurva infeksi virus korona melandai. Kebijakan ini juga mampu membuat Italia mempersiapkan sistem kesehatannya untuk menghadapi gelombang virus yang kedua. Pemerintah Italia memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakatnya sebesar 3,3 miliar euro untuk didistribusikan ke wilayah-wilayah di Italia. Selain itu juga pemerintah mengerahkan psikolog untuk membantu masyarakat terkait dengan mental kesehatan melalui *call center*. *Call center* ini telah membantu 750 warga yang kesepian, ketakutan, dan gangguan kepanikan. Sektor pertanian dimana sektor yang masih menghasilkan di Italia semakin dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Asosiasi Agrikultural di Italia bahkan telah

mendirikan situs lowongan kerja dan sudah lebih dari 20,000 warga mendaftar untuk bekerja disektor ini. (Faruk et al.2021:306)

Selanjutnya, di negara lain adalah seperti kebanyakan orang tahu bahwa Amerika Serikat (AS) adalah satu-satunya tempat di bumi dimana setiap individu bebas untuk memenuhi impian mereka. Semua kebebasan juga telah diatur sedemikian rupa. Di AS, ada yang namanya kebebasan berekspresi, yang terdiri dari kebebasan berbicara, beragama, petisi, pers, dan berkumpul. Istilah umum yang tercatat adalah kebebasan berekspresi. Melindungi hak individu atas kebebasan berekspresi tertulis dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. AS adalah alam mimpi bagi individu yang menginginkan kebebasan, tetapi mereka belum tentu bebas seperti yang mereka inginkan. (Handika Dewa, 2021)

Presiden AS Joe Biden sejak masa kampanye hingga resmi dilantik pada 20 Januari 2021 membuat sejumlah gebrakan. Gebrakan tersebut untuk menunjukkan keseriusannya menangani penyebaran virus korona. Biden membuat sejumlah kebijakan lantaran setahun terakhir mantan presiden Donald Trump kerap meremehkan penyebarannya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan dalam menangani pandemi (CNN, 2021). Ini terbukti pada April 2020 Negara AS didemo warganya yang *anti-lockdown*. Kemarahan warga yang menolak untuk tetap berada di rumah ini diluapkan dengan turun ke jalan untuk memprotes kebijakan. Demonstran yang sebagian besar berasal dari kalangan sayap kanan ini justru mendapat dukungan dari Presiden AS, Donald Trump yang waktu itu masih menjabat. Melalui cuitannya di Twitter, Donald Trump mendukung kebebasan pembatasan di sejumlah negara bagian, seperti Virginia dan Minnesota. Aksi

Trump di media sosial pun menuai protes dari sejumlah warga lainnya yang berseberangan dengannya. (Tribun.new, 2020)

Bagaimana dengan Negara Indonesia? Keselamatan rakyat di tengah pandemi Covid-19 saat ini merupakan hukum tertinggi. Oleh sebab itu, penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sudah semestinya dilakukan dengan tegas. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas untuk membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin pagi, 16 November 2020. (Humas Kemensetneg, 2020)

Kampanye atas kebijakan umum terkait penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada semester kedua 2020 yang meliputi peningkatan disiplin dan penegakan protokol kesehatan, percepatan perubahan perilaku, serta penetapan program vaksinasi nasional terus digalakan hingga saat ini. Memasuki Agustus 2020 penerapan protokol kesehatan tidak hanya sebatas imbauan, pemerintah meningkatkan disiplin dan menegakan hukum protokol kesehatan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Aturan ini memberi kepastian hukum untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban menjalankan protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran atas protokol kesehatan ini dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. (Kompas Pedia, 2020)



Selain itu, pengetatan restriksi oleh Pemerintah Indonesia dilakukan dengan menambah alokasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Rp744,75 triliun khususnya untuk memperkuat anggaran kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat serta pekerja dan usaha kecil yang terdampak. Sebagai contoh, Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta keluarga kemudian diberikan untuk 12 bulan agar melindungi daya beli dan kebutuhan dasar masyarakat dengan pendapatan terbawah. Program Kartu Sembako juga diperkuat dengan menambah penyaluran sebanyak 2 bulan di mana pada bulan Juli sampai Agustus diberikan dua kali bagi 18,8 juta keluarga. Di samping itu Pemerintah juga memberikan program Kartu Sembako PPKM untuk 5,9 juta keluarga serta menyalurkan Bantuan Beras Bulog 28,8 Juta keluarga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Kartu Sembako. Selain itu juga program prakerja, bantuan subsidi upah tenaga kerja, bantuan kuota internet juga diperkuat untuk terus memberi dukungan serta perlindungan pada para pekerja, pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, dan lain sebagainya di tengah situasi yang mengharuskan kita semua untuk meminimalisasi aktivitas sosial secara langsung. Anggaran kesehatan juga menjadi salah satu prioritas yang mendapat dukungan APBN secara luar biasa agar Indonesia dapat memaksimalkan upaya penanganan pandemi, khususnya di tengah lonjakan kasus yang sedang terjadi. Anggaran kesehatan hingga Rp 214,95 triliun terus difokuskan pada penguatan sistem kesehatan, fasilitas kesehatan termasuk pembangunan rumah sakit darurat dan penyediaan suplai oksigen, pembayaran klaim pasien Covid-19, insentif untuk tenaga kesehatan, *testing, tracking*, hingga percepatan vaksinasi. (Kemenkeu, 2021)

Selain itu, Pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan desa dalam penanganan penyebaran virus korona melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 karena desa merupakan salah satu garda terdepan dalam mengontrol penyebaran Covid-19. (Arofatina Maulina Ulfa, 2021). Selanjutnya Bapak Sutoro Eko dalam channel Youtube 2021 saat mengisi kuliah umum mengatakan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki negara lain yaitu emansipasi lokal. Hal tersebut mengarah pada berdaulat secara politik, yang mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir. Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (*rekognisi*) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas. (Boni Kurniawan, 2015)

Secara empirik desa bertenaga sosial yaitu desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong

merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi (Eko, et., al. 2014).

Seperti halnya dengan Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang membangun relasi dengan Masyarakat Padukuhan, yaitu dengan menghadirkan mahasiswa KKN reguler 54 tahun 2021 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang terdiri dari kelompok 46 dan kelompok 47 di Padukuhan Kromodangsan dan Padukuhan Sedogan. Mahasiswa KKN turun secara langsung atau berinteraksi langsung dengan Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dan warga masyarakat Kalurahan Lumbungrejo untuk melakukan observasi, analisis, rencana kegiatan, realisasi kegiatan hingga evaluasi kegiatan dalam penanganan Covid-19. Penanganan tersebut mencakup: Pertama, bidang literasi publik yaitu dengan membuat media edukasi seperti *flyer*, poster, dan spanduk tentang peduli pandemi Covid-19. Pencetakan brosur, *flyer*, dan spanduk adalah bantuan dari salah satu sponsor dari perusahaan swasta yaitu studio “Megido Design” senilai Rp 580.000,- . Kedua, bidang kesehatan yaitu vaksinasi dan dukungan fasilitas kesehatan untuk warga yang terpapar Covid-19 dan isolasi mandiri. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pendataan bagi warga yang sudah vaksin dan belum vaksin namun hanya warga yang berusia 18 tahun keatas. Kegiatan tersebut bersamaan dengan pembagian masker kain bantuan dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sleman. Menyalurkan bantuan berupa masker medis untuk dewasa dan anak-anak, *hand sanitizer*, *full set* APD, obat-obatan dan vitamin yang dananya bersumber dari proposal yang telah dibuat oleh mahasiswa KKN dan telah disetujui

dan disahkan oleh Pemerintah Kalurahan Lumburejo. Kemudian proposal tersebut tembus dari perusahaan swasta yaitu Sate Taichan Yogyakarta, SPBU Soropadan, Kantor *Artland Sportwear* Sleman, *Saladqu* Sleman, *Joe Furniture* Sleman dengan total uang tunai Rp 5.300.000,. Ketiga, bidang pendidikan anak yaitu dengan membantu mengajarkan soal-soal atau PR anak-anak yang masih duduk di bangku pendidikan PAUD, TK, dan SD kelas 1 sampai 3. Dan keempat, bidang kesejahteraan sosial yaitu membantu panitia dari Kalurahan Lumbungrejo dalam penyaluran bantuan sosial di Kalurahan Lumbungrejo. Bagi setiap penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat Lumbungrejo menerima tambahan beras sebanyak 10 kg.

Hingga Agustus 2021, Relasi antara Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dengan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tersebut masih berjalan karena pada waktu itu Kalurahan Lumbungrejo masuk dalam kategori zona merah artinya kasus Covid-19 di kalurahan tersebut tinggi apalagi dengan munculnya Covid-19 varian-varian baru seperti sekarang ini. Dalam relasi yang telah dijelaskan diatas, Mahasiswa KKN mampu merangkul warga masyarakat kedua padukuhan tersebut dan membantu meringankan tugas serta tanggung jawab Pemerintah Kalurahan dalam penanganan Covid-19 di Kalurahan Lumbungrejo. (Kelompok 46, 2021)

Penelitian ini menggunakan perspektif *government*. Menurut mazhab timoho (2020) *government* yaitu pemerintahan adalah intitusi dan arena kekuasaan-kewenangan pemerintah. Secara sosiologis-historis, pemerintahan adalah tradisi alamiah umat manusia ketika bermasyarakat, beradat, bersuku, berdesa dan

bernegara. Yakni ada kepentingan bersama untuk mengatur dan mengurus dirinya. Dan berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merasa perlu untuk mengangkat isu ini sebagai sebuah tema dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pemerintahan Pandemi (Studi tentang Relasi antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Covid-19 di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pandemi Covid-19 membentuk pemerintahan? Bagaimana karakteristik pemerintahan pandemi? Dan bagaimana relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah supaya mengetahui pandemi Covid-19 dalam membentuk pemerintahan, mengetahui karakteristik pemerintahan pandemi, dan mengetahui relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis untuk memberikan evaluasi atau catatan kritis atas studi-studi pemerintah pandemi.

2. Manfaat praktis adalah penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran atau solusi bagi desa-desa lain dalam pemerintah pandemi.

## **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual ini disusun dalam rangka memberikan jawaban secara teoritis terhadap pertanyaan penelitian. Penulis akan memahami konsep pemerintahan pandemi dengan melihat pandemi Covid-19 ini membentuk pemerintahan, dengan karakteristik pemerintahan pandemi, dan dengan relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi.

### **1. Pandemi Bencana Darurat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandemi diartikan sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Selanjutnya pandemi atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *pandemic* merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pan* (semua) dan *demos* (orang). Secara harfiah, gabungan dari kedua kata itu dimaknai sebagai epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya meliputi benua atau di seluruh dunia. Menurut KBBI, epidemi adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban. Selanjutnya yang disebut bencana menurut KBBI, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan.

Menurut World Health Organization (WHO), pandemi dinyatakan ketika penyakit baru menyebar di seluruh dunia melampaui batas, dengan kata lain pandemi adalah ketika penyakit menular dengan mudah dari orang

ke orang dibanyak bagian dunia pada waktu yang bersamaan. WHO menyebutkan bahwa suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai pandemi jika memenuhi tiga syarat yaitu timbulnya suatu penyakit merupakan hal baru yang terjadi pada sebuah populasi, penyebab penyakit menginfeksi manusia dan mengakibatkan sakit yang serius, dan penyebab penyakit menyebar dengan mudah dan berkelanjutan.

Dengan adanya pandemi yang menimbulkan bencana darurat tersebut akan menimbulkan risiko bencana. Risiko bencana ini terdapat potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu menuntut untuk tanggap terhadap darurat bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Sehingga dengan terjadinya pandemi bencana darurat tersebut akan menimbulkan masyarakat risiko, masyarakat terdampak serta menuntut untuk tangguh terhadap bencana.

#### **a. Masyarakat Resiko**

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari kata "*syaraka*" yang berarti "ikut serta, berpartisipasi". Sementara di bahasa Inggris, istilah masyarakat disebut dengan "*society*" yang berasal dari kata latin "*socius*", berarti "kawan," yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat juga berarti



bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Koentjaraningrat, 2013)

Istilah masyarakat (*society*) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial modern yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat juga digunakan untuk menggambar kelompok manusia yang besar, sampai pada kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 2006). Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah "*a union of families*" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat. (Khairuddin, 2008)

Adapun risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko merupakan suatu konstruksi sosial sehingga dalam memahami dan meresponsnya harus bedasar pada konteks sosial (York et al., 2003). Risiko adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam hal apapun. Ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai berikut (Salim, 2005):

- 1) Ketidaktentuan ekonomi yaitu kejadian yang timbul sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, umpama perubahan selera atau nikmat konsumen atau terjadinya perubahan pada harga, teknologi, atau didapatnya penemuan baru, dan lain sebagainya.
- 2) Ketidaktentuan yang disebabkan oleh alam misalnya kebakaran, badai, topan dan lain sebagainya.
- 3) Ketidaktentuan yang disebabkan oleh perilaku manusia misalnya peperangan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya.

Risiko secara sederhana dapat diartikan sebagai dampak atau efek yang menimpa manusia akibat terjadinya aktivitas tertentu yang membawa marabahaya. Risiko dipahami sebagai sesuatu yang bersifat negatif karena tidak jarang menimbulkan dampak destruktif terhadap manusia. Jadi, risiko adalah aktualisasi dampak kerugian atau kehilangan, baik yang bersifat fisik, material, maupun psikologis dalam masyarakat yang akan mempengaruhi masa depan mereka ketika marabahaya datang menghampiri. (Hanif, 2008)

Selanjutnya masyarakat risiko merupakan suatu istilah yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan ke kondisi-kondisi baru dalam kehidupan manusia saat ini. Istilah masyarakat risiko (*risk society*) merupakan istilah yang melekat pada sosiolog kenamaan Jerman Ulrich Beck. Istilah tersebut sebenarnya dapat dilihat sebagai sejenis masyarakat industri karena kebanyakan risikonya berasal dari industri. Hal tersebut dapat terjadi sebab menurut Beck kita masih berada dalam era modern,

walaupun dalam bentuk modernitas yang baru. Menurut Clark, perbedaan tersebut terletak pada tahap “klasik” modernitas yang sebelumnya berkaitan dengan masyarakat industri, sedangkan modernitas “baru” berkaitan dengan masyarakat risiko. (Ritzer dan Goodman, 2003:561)

Beck di dalam *Risk Society: Towards a New Modernity* (1992) menjelaskan ‘risiko’ (*risk*) sebagai kemungkinan-kemungkinan kerusakan fisik (termasuk mental dan sosial) yang disebabkan oleh proses teknologi dan proses-proses lainnya, seperti proses sosial, politik, komunikasi, seksual. Dengan demikian, risiko mempunyai hubungan sangat erat dengan sistem, model, dan proses perubahan di dalam sebuah masyarakat (industrial, modernisasi, pembangunan), yang akan menentukan tingkat risiko yang akan dihadapi oleh masyarakatnya. Masyarakat risiko merupakan suatu istilah yang menunjukkan bahwa terjadi perubahan ke kondisi-kondisi baru dalam kehidupan manusia saat ini. Terdapat perbedaan pendapat pada hal tersebut, disatu pihak perubahan dimaksud mengarah dari era modernitas menuju modernitas lanjut, sedangkan ada yang menyebut pula perubahan tersebut terjadi dari era modernitas menuju postmodernitas. Walaupun begitu, keduanya sepakat bahwa perubahan tersebut melahirkan konsekuensi penting. Konsekuensi yang dimaksud ialah tuntutan akan kesadaran bahwa dalam kehidupan manusia kini lebih diwarnai ketidakmenentuan dan risiko yang sewaktu-waktu dapat mengancamnya. (Demartoto, 2013)

Beck menjelaskan ada 3 macam risiko yang terjadi, antara lain: risiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), risiko sosial (*social risk*) dan risiko mental (*psyche risk*). (Piliang, 2009)

- 1) Risiko fisik ekologis yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya (contohnya: gempa, tsunami, letusan gunung) atau risiko yang diproduksi oleh manusia (*man made risk*). Aneka risiko biologis yang “diproduksi” melalui aneka makanan, sayuran, hewan ternak, buah-buahan yang menciptakan aneka penyakit kanker, tumor ganas, syaraf, kulit disebabkan oleh intervensi proses artifisial-kimiawi terhadap proses alam yang melampaui batas. Risiko ekologis berkaitan dengan bahaya-bahaya fisik yang terjadi pada manusia dan alam.
- 2) Risiko sosial yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal kondisi alam, teknologi, industri. Risiko fisik “kecelakaan” (lalu lintas jalan, pesawat terbang, kecelakaan laut), “bencana” (banjir, longsor, kebakaran hutan, kekeringan), yang sekaligus menciptakan pula secara bersamaan risiko sosial, berupa tumbuhnya aneka “penyakit sosial” (ketakpedulian, ketakacuhan, indisipliner, fatalitas, egoisme dan immoralitas).
- 3) Risiko mental hancurnya bangunan psikis, berupa perkembangan aneka bentuk abnormalitas, penyimpangan (*deviance*) atau kerusakan psikis lainnya, baik yang disebabkan faktor eksternal maupun internal.

Tokoh lain yang juga membahas mengenai risiko adalah Anthony Giddens. Hal tersebut diperkuat pernyataannya mengenai modernitas, modernitas adalah kultur risiko. Ini bukan berarti bahwa kehidupan sosial kini lebih berbahaya daripada dahulu, bagi kebanyakan orang itu bukan masalah. Konsep risiko menjadi masalah mendasar baik dalam cara menempatkan aktor biasa maupun aktor yang berkemampuan spesialis-teknis dalam organisasi kehidupan sosial. Modernitas mengurangi risiko menyeluruh bidang dan gaya hidup tertentu, tetapi pada waktu bersamaan memperkenalkan parameter risiko baru yang sebagian besar atau seluruhnya tidak dikenal di era sebelumnya. Giddens membedakan risiko lingkungan pra modern (tradisional) dan modern. Menurutnya risiko kebudayaan tradisional didominasi oleh bahaya dunia fisik, sementara risiko lingkungan modern distrukturasi terutama oleh risiko yang ditimbulkan. Selain itu, Giddens juga berpendapat bahwa “risiko bukan semata-mata tindakan individu. Ada risiko lingkungan yang secara kolektif mempengaruhi massa individu yang besar.

Penjelasan lain oleh Giddens di dalam modernitas yang lebih maju, isu sentral ialah risiko dan bagaimana risiko itu dapat dicegah, diminimalkan dan disalurkan (Ritzer, 2012:946). Risiko didefinisikan sebagai peluang kerugian fisik karena proses-proses teknologi dan lainnya. Risiko juga berkaitan dengan sistem, model dan perubahan sosial. Ritzer (2014:515) memaparkan jenis risiko yang dapat terjadi dalam masyarakat yang telah dikutip dari karya Beck, yaitu;

- 1) Risiko bisa tidak terlihat (*invisible*), tidak bisa diubah dan didasarkan pada interpretasi kausal. Dalam konteks lingkungan, risiko-risiko tidak bersifat jangka pendek, akibatnya kita baru menyadari dampak lingkungan sesaat setelah bencana itu terjadi. Tetapi, hubungan sebab akibat tentang gejala itu, sangat mudah dijelaskan.
- 2) Risiko diproduksi manusia lewat sumber-sumber kekayaan dalam masyarakat industri. Risiko adalah konsekuensi yang tidak terduga secara besar-besaran, terutama, sebagai akibat industrialisasi dengan pengaruh-pengaruhnya yang membahayakan.
- 3) Risiko berhubungan dengan masyarakat yang mencoba melepaskan tradisi dan pengetahuan masa lalu dengan menganggap bernilai dan berharga perubahan-perubahan dan masa depan. Perubahan dan masa depan, sebagai akibat watak modernisasi, melahirkan sifat eksploitatif yang sesungguhnya berlawanan dengan kearifan-kearifan tradisi.
- 4) Risiko tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Beberapa preposisi penulis menyatakan sebagai berikut: kerusakan lingkungan pada satu tempat akan bisa menyebar ke tempat lain. Kerusakan lingkungan pada satu generasi akan diwariskan pada generasi yang lain. Persoalan lingkungan yang terjadi di negara maju, akan bisa menjadi musibah di negara berkembang. Misal, terjadinya badai Katrina, di New Orleans, Amerika, ternyata membawa pengaruh secara langsung dengan kenaikan harga minyak dunia. Sekalipun terjadi di negara Amerika,

Indonesia turut terkena imbasnya. Sebagai tanggapan, pemerintah RI harus mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dari masyarakat.

- 5) Risiko dan kelas tidak terpisah. Risiko terjadi baik dikalangan masyarakat kelas atas maupun kelas bawah, karenanya ia tidak menghilangkan masyarakat kelas, melainkan menguatkan. Distribusi risiko melekat dalam pola kelas secara berkebalikan. Kekayaan mengakumulasi pada lapisan sosial atas, risiko melekat dalam lapisan sosial bawah. Kalangan masyarakat atas mampu menghindar dari risiko, sementara masyarakat bawah menjadi objek dari risiko tersebut. Pada konteks ini dalam menjelaskan tentang lapisan masyarakat, tidak menutup kemungkinan yang dinyatakan Beck, yakni lapisan atas identik dengan bangsa kaya (*rich nations*), sedangkan lapisan bawah diidentikkan bangsa miskin (*poor nations*).

Pada hakikatnya risiko dapat membahayakan semua bentuk kehidupan yang ada di planet ini. Sehingga risiko memiliki hubungan dengan antisipasi, dengan kehancuran yang belum terjadi namun sedang mengancam dan dalam arti itu tentunya risiko sudah terlihat nyata (Beck, 2015:25). Risiko dapat berada di dalam apapun dan segala sesuatu, dan bersama dengan yang mutlak dalam kehidupan, udara untuk dihirup, makanan, pakaian, perabotan rumah, semua itu mampu menerobos jika tidak secara ketat mengontrol wilayah perlindungan (Beck, 2015:36). Menjadi penting di dalam masyarakat risiko untuk dapat mengatasi atau

berusaha meminimalisir masalah yang akan terjadi dalam kehidupan manusia.

#### **b. Masyarakat Berdampak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dalam e-journal "*Acta Diurna*" Volume V. No.1. Tahun 2016 oleh Andreas G. Ch. Tampi dkk, menjelaskan bahwa dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pengambilan keputusan. Seseorang yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil.

Dampak dapat dibagi dalam dua bagian yaitu: Pertama, Dampak positif yang berarti pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan atau tidak mengakibatkan sesuatu yang merugikan bagi sesama manusia, lingkungan alam sekitar atau lingkungan alam, ataupun sesuatu yang berhubungan bisa mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain. Dampak positif berarti pengaruh dan akibat yang ditimbulkan



oleh suatu pengambilan keputusan akan menguntungkan bagi sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Kedua, Dampak negatif yang berarti pengaruh dan akibat yang ditimbulkan oleh suatu pengambilan keputusan akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik terhadap sesama manusia dan lingkungan alam sekitarnya, ataupun pengambilan keputusan itu mengakibatkan kerugian bagi sesama manusia ataupun lingkungan alam sekitar yang akan berakibat kerugian besar dikemudian hari.

Selanjutnya oleh Sutoro Eko dalam tulisannya di akun Facebook 2 mei 2020 tentang “GEDIBAL” menyebutkan bahwa dengan terjadinya pandemi bencana darurat ini yaitu Covid-19 dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu “terpapar” dan ”terdampak”. Secara hipotetik, bahwa desa urban semakin terpapar dan terdampak lebih besar, sedangkan desa rural semakin lebih kecil terpapar dan terdampak. Namun tentu masih ada satu variabel penting, yakni disiplin atas protokol Covid-19, yang mempengaruhi kadar terpapar. Jika protokol dijalankan dengan baik dan disiplin, maka risiko terpapar semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Desa rural pun bisa terpapar kalau protokol tidak dijalankan, atau karena ada orang terpapar tetapi tidak berkata jujur.

Secara tipologis, Sutoro Eko membagi empat tipe yang berbeda antara “terpapar” dan “terdampak”. Pertama, desa yang tidak terpapar dan tidak terdampak. Seperti rambu lalu-lintas, disebut sebagai “desa biru”. Karena di pedalaman atau terisolasi, desa biru ini tidak terpapar corona dan secara ekonomi juga tidak terdampak, meskipun secara ekonomi desa

ini bersifat subsisten, bahkan stagnan. Warga desa seperti biasanya bersawah, berkebun, berhutan, berkebun, dan lain-lain, tanpa terganggu dengan pandemi corona. BLT tentu tidak penting bagi desa biru, meskipun tetap ada warga yang pengen BLT. Kedua, desa yang terpapar tetapi tidak terdampak disebut sebagai desa kuning. Artinya warning, penuh perhatian dan waspada. Berarti protokol tidak berjalan dengan baik. Secara geografis desa ini transisi. Tidak terlalu kota dan juga tidak terlalu pedalaman. Mereka terpapar antara lain karena transmisi dari orang yang bepergian atau karena pemudik. Secara ekonomi, desa kuning tidak terlalu terdampak. Dampaknya sangat kecil. Aktivitas warga dalam bersawah, berkebun, berladang, beternak, maupun memproduksi yang lain, masih tetap berjalan. BLT tidak terlalu penting bagi desa ini. Kalau BLT dipaksakan di desa ini, malah bisa bikin gaduh.

Ketiga, desa yang tidak terpapar tetapi terdampak. Disebut desa hijau, yang secara geografis merupakan desa urban. Banyak warga yang bekerja di luar sektor pertanian, sehingga mudah terdampak secara ekonomi. Pekerja dipulangkan ke rumah, lalu *lockdown* di rumah. Karena *lockdown* itu, dan karena disiplin pada protokol, maka desa ini “bersih” dari virus korona. Disebut “desa hijau”, artinya harus jalan terus, tentu tetap disiplin protokol. Yang jalan terus adalah BLT dan aktivitas ekonomi lokal, termasuk padat karya tunai. BLT pemerintah, misalnya kartu prakerja, dapat diberikan kepada korban PHK. Anggaran desa lebih baik digunakan untuk proyek padat karya dan aktivitas ekonomi di sektor pertanian, termasuk

menjaga ketahanan pangan. Keempat, desa yang terpapar sekaligus terdampak. Disebut desa merah, yang berada di perkotaan. Banyak warga yang terpapar korona, dan lebih banyak warga yang terdampak secara ekonomi. Merah artinya berhenti. Aktivitas ekonomi untuk sementara harus berhenti. Kalau sudah begini, desa merah harus diisolasi dan dikontrol dengan ketat. Bantuan pemerintah dan bantuan desa yang harus lebih banyak bekerja.

## **2. Penanganan Covid-19**

Corona virus adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Jenis corona virus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit ada dua yaitu *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus korona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Covid-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, dan tidak melalui udara. Orang yang beresiko tertular penyakit ini adalah orang-orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 tidak terkecuali tenaga medis yang merawat pasien Covid-19.

Menurut buku milik Kamil, dkk (2020) banyak negara di dunia, kasus dan bahkan wabah Covid-19 telah terjadi. WHO dan melalui Kementerian Kesehatan memberikan arahan untuk melakukan beberapa langkah pencegahan agar dapat mengurangi risiko terinfeksi atau

menyebarkan Covid-19. Jika hasil tes pemeriksaan Covid-19 positif, tetap tenang dan jangan panik. Laporkan diri ke posko Kejadian Luar Biasa (KLB) Dinas Kesehatan masing-masing kota atau ke Puskesmas kecamatan sesuai tempat tinggal. Petugas *surveilans* dari Puskesmas kecamatan akan mendata dan mengevaluasi kondisi pasien. Jika gejala yang dirasakan ringan, dokter akan memberikan obat-obatan simptomatik untuk meredakan gejala dan menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. (Shihab, 2020)

#### **a. Peran Pemerintah**

Peran pemerintah merupakan gerak aktualisasi kedaulatan Negara dalam mencapai tujuannya yang dikendalikan oleh norma dan nilai dasar dalam hubungan interaksi dengan lingkungan (Sitanggang, 1996:134). Pendapat ahli di atas dapat dijelaskan bahwa peranan pemerintah ialah hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah guna mencapai tujuan yang ingin dikehendaki. Menyebarnya Virus Covid-19 yang begitu cepat dan pesat hampir menyebar diseluruh wilayah di Indonesia setiap saatnya, sehingga menimbulkan beberapa masalah yang sangat merugikan Negara. Masalah yang dimaksudkan dari penyebaran wabah Virus Covid-19 tersebut yaitu berupa ancaman terhadap kemanusiaan, sosial dan ekonomi atau keuangan Negara.

Sejak Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi, menindaklanjuti hal tersebut Pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus korona telah menjadi bencana

nasional non alam. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah provinsi, kabupaten, bahkan pemerintah kota. Pernyataan presiden kemudian menyusul pada penetapan Indonesia dalam status bencana nasional non alam Covid-19 yang meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Sehingga langkah-langkah yang diintruksikan adalah agar proses belajar dan bekerja dapat dilakukan dirumah, dan juga menganjurkan untuk menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621–2781 *Online Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 242 dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di

wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menurut Keppres ini adalah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Terkait dalam upaya penanggulangan Covid-19 dengan mengacu pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang mengarah pada keputusan ketiga bahwa Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

#### **b. Peran Masyarakat**

Peran masyarakat memiliki makna yang sangat luas, para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan. Peran masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggungjawab kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Peran masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab serta mengembangkan kemampuan untuk bisa menyadari akan pentingnya kesehatan. Peran masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya. (Dep Kes RI, 1997, hal 5)

Tujuan peran masyarakat adalah untuk meningkatkan peran dan kemandirian, kerjasama dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki visi yang sesuai; Meningkatkan kuantitas jejaring kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat; Memperkuat peran aktif masyarakat dalam setiap tahap dan proses pembangunan melalui peningkatan jaringan kemitraan dengan masyarakat. (Dep Kes RI, 1997, hal 5)

Dalam menyukseskan kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah, ada beberapa peranan penting yang dapat dilakukan masyarakat yaitu: Pertama, dengan cara jujur melaporkan kasus yang ada dan bersikap suportif saat dilakukan penjarangan kontak erat oleh petugas. Kedua, mematuhi persyaratan perjalanan, baik mengikuti prosedur yang sesuai maupun memperlihatkan dokumen prasyarat melalui prosedur yang benar tanpa kecurangan. Ketiga, mendukung dan proaktif mengikuti vaksinasi dengan syarat memenuhi seluruh persyaratan pra vaksinasi dan dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan. Keempat, memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat terlebih dahulu demi prosedur isolasi yang terpantau dengan baik. Opsi isolasi mandiri di rumah dapat diambil sebagai jalan terakhir jika fasilitas isolasi terpusat tidak tersedia dan harus berada di bawah pengawasan Puskesmas setempat. (Biro Adpim, 2021)

Selain itu, setelah lebih dari 1 tahun pandemi, kebijakan mitigasi harus lebih sensitif dan tidak terbatas pada aspek kesehatan. Hal ini mengingat hampir seluruh negara di dunia merasakan dampak seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran, perubahan sistem pendidikan, dan isolasi sosial maupun psikososial. Saat ini penerapan kebijakan di Indonesia sudah mencoba mewadahi semuanya, baik menerapkan kebijakan mengendalikan kasus sekaligus tetap memperhatikan sektor sosial kemasyarakatan untuk dapat beroperasi secara terkendali.



### 3. Ciri-ciri dan Fungsi Pemerintah

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan,” kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”:

- 1) Adanya “keharusan,” menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
- 2) Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;
- 3) Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
- 4) Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah.

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”.

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/ pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak sah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya

untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara. Maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu negara. (Surianingrat, 1992)

Artikel bertitel *Why We Need a New Theory of Government*, karya Margaret Levi (2006), seorang guru besar ilmu politik di Universitas Stanford, yang didudukkan sebagai teori institusi dalam kotak (teori endogen untuk pembentukan teori pemerintah). Levi mengambil posisi berbicara tentang pemerintah, khususnya *trustworthy government*. Dia berbicara tentang pemerintah yang baik: representatif, responsif, akuntabel, yang berujung pada efektivitas. Levi mengklaim teori baru pemerintah sebagai teori yang endogen dan dinamis. Karya Levi membangkitkan kembali teori pemerintah, sebuah teori yang benar-benar utuh dan berpusat pada pemerintah, tetapi juga tidak terjebak secara sempit pada organisasi dan manajemen pemerintahan maupun formasi pemerintah, melainkan juga melihat relasi kuasa pemerintah dengan masyarakat, rakyat, warga dalam formasi negara. Levi secara jelas membangun teori institusi berjangkau menengah (*middle range theory*), yang bisa menembus dan menciptakan kohersi antara politik, demokrasi, aspirasi, partisipasi, dan legitimasi dengan hukum, birokrasi, regulasi, administrasi dan legalitas. (Sutoro Eko, 2021:194)

Pemerintahan adalah institusi dan arena kekuasaan kewenangan pemerintah. Secara sosiologis-historis, pemerintah(an) adalah tradisi alamiah umat manusia ketika mereka bermasyarakat, beradat, bersuku, berdesa, dan bernegara, yakni ada kepentingan bersama untuk mengatur dan mengurus dirinya. Dalam negara modern, pemerintah adalah otoritas tertinggi (*supreme authority*) yang menyelenggarakan, memerintah, mengatur, mengurus negara, termasuk untuk mencapai tujuan negara yang digariskan dalam konstitusi pemerintah menunjuk pada pemimpin eksekutif, plus legislatif dan administratif (birokrasi) Dalam demokrasi, pemerintah partai (*party government*) merupakan kelaziman, yang menguasai eksekutif dan legislatif. Berbeda dengan negara, pemerintah bersifat dinamis, yang silih berganti secara berkala. Pemerintah memiliki hukum dan regulasi, Pemerintah direpresentasikan oleh pejabat politik. Pemerintah berhubungan dengan demokrasi atau otokrasi. Melawan pemerintah merupakan sebuah kelaziman. (Sutoro Eko, 2020)

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama. (Rasyid, 2002)

Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (*service*), Pemberdayaan

(*empowerment*), dan Pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 2002)

Siagian mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*), Kedua, pertahanan dan keamanan, Ketiga, diplomatik dan Keempat, perpajakan. Sedangkan menurut Ndraha (2000) ada dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
- 2) Fungsi sekunder, yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat. Keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Karena begitu luas dan kompleksnya tugas pemerintahan yang bekerja dalam suatu kawasan negara yang luas, maka sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Bab II tentang Pembagian Wilayah Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Pembentukan wilayah yang dibagi ke dalam daerah besar dan kecil tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembentukannya terstruktur dari pusat (Pemerintah) sampai ke daerah (Pemerintah Daerah), yang keduanya tidak dapat dipisahkan atau lepas hubungannya antara satu dengan yang lain, sehingga dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan bertanggung jawab pula kepada masyarakatnya. Pemerintah harus didekatkan kepada masyarakat, karena pemerintah yang baik adalah yang dekat dengan rakyatnya. Pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat agar pelayanan yang diberikan semakin baik. Hal tersebut didasarkan bahwa pada hakikatnya suatu pemerintahan itu memikul amanah dan kepercayaan masyarakat. (Rasyid, 1997)

#### **4. Solidaritas Masyarakat**

Solidaritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sifat (perasaan) solider; sifat satu rasa, senasib dan sebagainya; perasaan setia kawan (Depdiknas, 2007). Terbentuknya solidaritas secara umum memerlukan beberapa rangkaian tahapan untuk terciptanya sebuah

solidaritas yaitu antara lain: Adanya interaksi yang menghasilkan hubungan sosial, sehingga tercipta solidaritas.

Terbentuknya sebuah interaksi sosial tidak lepas dari sosok manusia sebagai makhluk sosial yang mana setiap gerak-gerik kesehariannya dalam sebuah lingkungan sosialnya (masyarakat) mereka selalu membutuhkan kehadiran orang lain yang bisa memenuhi kebutuhannya, dengan kata lain manusia memerlukan mitra untuk mengembangkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal tersebut terjadi karena manusia sejak dilahirkan sudah memiliki keinginan pokok yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya (yaitu masyarakat) dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. (Soekanto, 2005:101)

Solidaritas adalah saling percaya antara para anggota dalam satu kelompok atau komunitas. Kalau orang saling percaya maka mereka akan menjadi satu/menjadi persahabatan, menjadi saling hormat-menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan sesamanya (Soedijati, 1995). Istilah solidaritas dalam kamus ilmiah populer diartikan sebagai “kesetiakawanan dan perasaan sepenanggungan.” Sementara Johnson (1994) dalam bukunya mengungkapkan bahwa Solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan hubungan serupa itu mengandaikan

sekurang kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu.

Solidaritas menjadi kebutuhan setiap masyarakat atau kelompok sosial. Masyarakat akan tetap ada jika dalam kelompok sosial memiliki rasa solidaritas diantara anggota-anggotanya. Dalam buku Teori Sosiologi Klasik dan Modern (1994) karya Doyle Paul Johnson, solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu dan atau kelompok yang berdasar pada moral dan kepercayaan yang dianut bersama, serta pengalaman emosional bersama. Solidaritas yang dipegang, yaitu kesatuan, persahabatan, rasa saling percaya yang muncul akibat tanggung jawab bersama, dan kepentingan bersama di antara para anggotanya. Pengertian akan solidaritas juga diperjelas oleh sosiolog Emile Durkheim. Solidaritas adalah perasaan saling percaya antara para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas. Jika orang saling percaya maka mereka akan membentuk persahabatan, mejadi saling menghormati, terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan kepentingan bersama.

Diambil dari buku Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern (2012) karya George Ritzer, perkembangan masyarakat dilihat dari masyarakat yang berkembang di lingkungan sederhana menuju masyarakat di lingkungan modern. Perbedaan tersebut membuat Emile Durkheim membuat dua tipe solidaritas, yaitu:

1) Solidaritas mekanik.

Merupakan rasa solidaritas yang berdasarkan suatu kesadaran kolektif. Bentuk solidaritasnya tergantung pada individu masing-masing yang memiliki sifat yang sama dan menganut kepercayaan serta pola normatif yang sama pula. Solidaritas mekanik biasanya muncul dari pedesaan. Hal ini dikarenakan solidaritas tersebut akan terbangun pada kelompok masyarakat yang masih sederhana.

Warga desa memiliki kesadaran kolektif sehingga tingkat individual masyarakat rendah. Contoh dalam kehidupan saat pandemi Covid-19, ketika ada warga yang isoman, maka seluruh warga atau kelompok sosial tersebut akan bersama-sama memberikan pertolongan dan kepedulian berupa pangan, obat-obatan dan memantau perkembangan kesehatan. Pada solidaritas mekanik, pembagian kerja masih belum jelas. Terkadang ada satu orang yang harus mengerjakan beberapa tugas. Pada dasarnya suatu masyarakat yang ditandai memiliki solidaritas mekanik akan bersatu karena memiliki rasa yang sama dengan semua orang. Pengikat di antara orang-orang dengan solidaritas mekanik adalah karena mereka semua terlibat dalam kegiatan yang hampir sama antara satu dengan lainnya.

2) Solidaritas organik

Solidaritas yang berkembang dalam kelompok masyarakat yang kompleks. Contohnya pada masyarakat perkotaan di mana para anggotanya disatukan oleh rasa saling membutuhkan untuk



kepentingan bersama. Di dalam solidaritas organik, pembagian kerja sudah jelas untuk masing-masing anggota kelompok. Bahkan disesuaikan dengan bidang atau keahlian masing-masing. Dalam solidaritas organik, masyarakat saling membutuhkan dan berhubungan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Bukan karena asas kebersamaan ataupun ikatan moral. Contohnya pada sebuah perusahaan pasti memiliki departemen atau bagian yang masing-masing memiliki tugas. Manfaatnya semua departemen tersebut bekerja dan akan saling membantu sesuai porsinya masing-masing untuk menjalankan sebuah perusahaan. (Kompas.com, 2019)

Solidaritas masyarakat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah masyarakat ataupun kelompok sosial karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas (Nuryanto, 2014). Kelompok-kelompok sosial sebagai tempat berlangsungnya kehidupan bersama, masyarakat akan tetap ada dan bertahan ketika dalam kelompok sosial tersebut terdapat rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya. Karena sesungguhnya solidaritas mengarah pada keakraban atau kekompakan dalam kelompok. Dalam perspektif sosiologi, keakraban hubungan antara kelompok masyarakat tidak hanya merupakan alat untuk mencapai atau mewujudkan cita-citanya, akan tetapi keakraban hubungan sosial tersebut juga merupakan salah satu tujuan utama dari kehidupan kelompok masyarakat yang ada. Keadaan kelompok yang semakin kokoh selanjutnya akan menimbulkan rasa saling memiliki dan emosional yang kuat diantara

anggotanya. Solidaritas juga merupakan kesetiakawanan antar anggota suatu kelompok.

Pandemi Covid-19 mengubah bentuk relasi sosial masyarakat dan memaksa mereka untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan menjaga jarak dengan orang lain. Hal ini secara ekonomi berdampak negatif bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang mengharuskan mereka berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Dengan tidak boleh ke luar rumah, tentu mereka tidak dapat memperoleh penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kesulitan yang dialami masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan ber-relasi karena pandemi Covid-19 diasumsikan dapat teratasi dengan nilai solidaritas masyarakat. Nilai saling berbagi, gotong royong, dan peduli sebagai perwujudan nilai solidaritas diharapkan mampu membantu masyarakat menghadapi dampak pandemi Covid-19.

## **5. Partisipasi Masyarakat**

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004:208). Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001:201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.

Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Kemudian, Cohen dan Uphoff (Siti Irene A.D., 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu: Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program yang meliputi menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan macam partisipasi yaitu partisipasi dalam proses perencanaan/

pembuatan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementing*), partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in benefits*).

Partisipasi masyarakat adalah gerak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut. dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses aktif, di mana masyarakat dapat mempengaruhi arah serta pelaksanaan dari pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam arti penghasilan, perkembangan pribadi, kemandirian. Serta berbagai yang mereka yakini. Partisipasi adalah proses di mana berbagai pelaku dapat mempengaruhi dan membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan dan keputusan serta pengalokasian berbagai sumber. (Andriani, 2021)

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun spelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek pembangunan yang berkesinambungan (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013). Sedangkan Mulyadi (2009:13) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam

melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran tidak semakin meluas. Partisipasi dalam hal ini perlu dibedakan dengan mobilisasi yang mengandung unsur paksaan/ keharusan, baik oleh pemerintah/ penguasa ataupun oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih (Mulyadi, 2009). Untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran virus korona tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan *social distancing/physical distancing, self-quarantine dan self-isolation*.

## **6. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya kita membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa.

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana di atas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Sedangkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

## **7. Emansipasi Pemerintah Desa**

Emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan yang berkaitan dengan persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Emansipasi itu harus memberikan hak yang sepatutnya diberikan kepada seseorang atau kumpulan orang yang telah dirampas atau diabaikan sebelumnya. Hal ini penting diberikan sebagai sarana kebebasan mengembangkan diri dan meningkatkan kemahiran profesional agar semua orang saling bahu-membahu dalam pembangunan dalam tanpa membedakan aspek-aspek kehidupan tertentu. Selain itu, emansipasi juga dilakukan agar mendapatkan hak politik dan persamaan derajat sosial bagi kelompok yang tak diberi hak secara spesifik. Pada hakikatnya, secara vertikal emansipasi akan terus berusaha menghilangkan perbedaan yang terlalu besar antara kelas-kelas sosial (*social gap*) dan secara horizontal akan memperkecil jarak sosial (*social distance*) antara pusat dan pinggiran. Maka dari itu, dengan emansipasi dominasi dan dependensi akan berakhir sehingga tercipta sebuah kesetaraan. (Wikipedia, 28 Januari 20220)



Isu ‘emansipasi’ telah menjadi perhatian sentral sejak abad 18. Ditandai maraknya aksi memperjuangkan adanya “kesamaan hak dan keadilan sosial, serta upaya membuat kaum miskin, minoritas dan marginal memiliki kekuasaan lebih besar, termasuk di bidang politik. Pada konteks inilah, pendekatan emansipatif lekat dicirikan dengan adanya perjuangan kekuasaan untuk membebaskan warga dari dominasi dan hegemoni kekuasaan pihak lain. Isu emansipasi, karenanya senantiasa sarat dengan isu “distribusi kekuasaan yang sama atau adil dan menyoal proses emansipasi berarti menyoal tentang negosiasi, hubungan timbal-balik, dan pemberdayaan, melalui pendekatan partisipatif yang diikuti dengan bertumbuh-kembangnya kesadaran kritis”. (Elizondo, et.al., 2013:425)

Emansipasi Pemerintah Desa adalah Sebuah kemampuan pemerintah desa untuk memahami dan menjadi kreator (*creators*) bagi kehidupan masyarakat desa, dengan menyadari adanya kondisi eksternal yang opresif dan mereka memiliki komitmen mengubahnya misal menangani pandemi Covid-19 atau menyadari kondisi eksternal yang diwarnai kontradiksi sosial, ekonomi dan politik antara pihak yang berkuasa dan pihak yang diperintah. Adanya kesadaran kritis ini, merupakan kunci fundamental membuat warga mau dan mampu proaktif menentang dominasi kekuasaan eksternal yang berwatak opresif kepada warga. (Elizondo, et.al., 2013:425)

Emansipasi pemerintah desa hakekatnya adalah memberikan hak yang sama kepada warga desa. Pemerintah desa memberikan kesetaraan

dalam melayani warga, tanpa membedakan status sosial ekonomi (tingkat pendidikan, tingkat pendapatan maupun jenis pekerjaan) warga desa. Sehingga pada masa pandemi, pemerintah hadir untuk menolong dan melayani warga tanpa pandang bulu. Namun karena adanya keterbatasan pemerintah desa, maka kemudian pemerintah desa melibatkan warga untuk bergotong royong dalam memerangi penyebaran virus Covid-19. (Elizondo, et.al., 2013:425)

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan perspektif *interpretivisme*. *Interpretivisme* akan menafsirkan, memberi konstruksi dan makna terhadap fenomena secara utuh (*konstruktivisme*). *Konstruktivisme* akan menggambarkan realitas apa adanya. Peneliti menggambarkan, menafsirkan dan memberi makna terhadap realitas berdasarkan kerangka konseptual. Pada konteks ini peneliti akan menggambarkan fenomena pembentukan pemerintah pandemik. Kerangka konsep yang digunakan dalam mengkonstruksi realitas digali dari berbagai macam sumber referensi seperti buku, jurnal dan media sosial.

Asumsi dasar *konstruktivisme* adalah fenomena-fenomena sosial politik tidak dibentuk secara alami, tetapi fenomena-fenomena ini dibentuk dan dikonstruksi. Setiap orang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu, dimana kesemua itu suatu saat akan digunakan untuk menafsirkan realitas sosial

yang ada disekelilingnya (Butsi, 2019; Samsu, 2017). Oleh karena itu, fenomena-fenomena ini bisa digambarkan, ditafsirkan, dikonstruksi dan diberi makna secara berbeda oleh setiap orang.

*Konstruktivisme* menggunakan nalar induktif yang menghasilkan konstruksi teori. Nalar induktif berpangkal dari penggambaran fenomena-fenomena khusus dan berakhir pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan atas fenomena-fenomena khusus tersebut akan menghasilkan pengetahuan baru atau *novelty* dalam penelitian ini. Untuk menghasilkan kebaruan penelitian, peneliti melakukan *review* kajian-kajian terdahulu sambil mengkritik, kemudian menentukan posisi dalam melakukan penelitian. Guru Desa Sutoro Eko berujar “melangkah di atas pundak-pundak orang lain, kemudian berjalan menggunakan kaki sendiri”.

## **2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016: 26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang permasalahan yang peneliti diamati. Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Teknik penentuan informan penelitian menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber

data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Sugiyono, 2018:368). Informan yang dipilih adalah pemerintah kalurahan dan masyarakat. Alasan menggunakan narasumber ini adalah untuk mengetahui secara pasti terkait pandemi Covid-19 dalam membentuk pemerintahan, mengetahui karakteristik pemerintahan pandemi, dan mengetahui relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun subjek penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Subjek Penelitian**

Nama	Jabatan
M Misbah Alhakim	Lurah
Nugroho Subagyo	Jagabaya
Umi Muyasaro	Staf Kamituwo
Windiati Astuti	Sekretaris BPK
Indah Jauhar R	Satgas Covid-19 Kalurahan
Arwin Sutikno	Satgas Covid-19 Padukuhan I
Muhammad Arif Yasfani	Satgas Covid-19 Padukuhan II
Listiana	Warga Masyarakat I
Suinah	Warga Masyarakat II
Imam Suhadi	Warga Masyarakat III
Prini Linggarwati	Warga Masyarakat IV
Leonard F. Hia	Mahasiswa KKN STPMD “APMD”

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Objek penelitian merupakan sesuatu yang mejadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi

dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono (2018:144) objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal *objective*, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek penelitian ini adalah pandemi Covid-19 membentuk pemerintahan, karakteristik pemerintahan pandemi, dan relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Sugiyono, 2018:207). Fokus dalam penelitian “Pandemi Covid-19 membentuk pemerintahan, karakteristik pemerintahan pandemi, dan relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta” ini diantaranya adalah:

- 1) Masyarakat resiko,
- 2) Ciri-ciri pemerintah dalam perspektif Indonesia komparatif,

- 3) Emansipasi pemerintah desa, dan
- 4) Solidaritas dan partisipasi masyarakat.

## **5. Pendekatan Penelitian**

Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat interpretatif menggunakan pendekatan kualitatif, metode kualitatif memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data. Peneliti kualitatif dapat memahami perilaku sosial, karena ia menemukan definisi tentang realitas dan bagaimana mempengaruhi prilakunya. Menurut Morrison, sifat penelitian ini adalah interpretatif, penelitian interpretatif memandang penelitian ilmiah tidaklah cukup untuk menjelaskan “misteri” pengalaman manusia sehingga diperlukan unsur manusiawi yang kuat dalam penelitian.

## **6. Sumber Data**

Dalam setiap penelitian disamping menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, karena di dalam setiap penelitian pasti memerlukan data. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang

data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah teks-teks berita mengenai faktor-faktor yang menyebabkan petani rumput laut beralih profesi ke sektor pariwisata, buku-buku, dan dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **7. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai teori dan asumsi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Studi pustaka ini dilakukan dengan mencari bahan-bahan atau materi dari kepustakaan.

### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung ke lapangan. Konstruksi terhadap realitas dipandu menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pertama, observasi atau pengamatan dilakukan terhadap beberapa fenomena di lokasi penelitian. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar masyarakat, interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi (Raco, 2010: 112). Observasi akan dilakukan di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fenomena atau realitas pandemi Covid-19 membentuk pemerintahan, karakteristik pemerintahan pandemi, dan relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi di

Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kedua, wawancara dilakukan untuk memahami fenomena atau realitas secara mendalam dan terbuka dimana pihak-pihak yang diwawancara akan diminta ide, pendapat dan pengalaman. Wawancara akan membantu peneliti menangkap arti atas fenomena yang dijelaskan informan (Raco, 2010: 166). Peneliti akan melakukan wawancara dengan Lurah, pamong, tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen masyarakat Kalurahan Lumbungrejo lainnya. Dalam proses wawancara peneliti akan mengajukan pertanyaan terbuka (memberikan kebebasan kepada pihak yang diwawancara untuk mengemukakan ide, pendapat, pengalaman), berdiskusi dan berdialog terhadap fenomena pandemi Covid-19 membentuk pemerintahan, karakteristik pemerintahan pandemi, dan relasi pemerintah dengan masyarakat dalam formasi pemerintahan pandemi di Kalurahan Lumbungrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) sesuai dengan kesepakatan keduabelah pihak. Untuk memperoleh hasil maksimal peneliti menggunakan beberapa alat bantu seperti alat tulis, *recorder* dan panduan wawancara.

Ketiga, dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian (Samsu, 2017: 99). Dokumentasi pada penelitian ini dihimpun melalui media gambar, kebijakan, program, kegiatan, profil desa, notulensi



musyawarah, daftar hadir peserta musyawarah dan dokumen lain yang terkait masalah penelitian. Hasil dokumentasi digunakan untuk memperkuat gambaran, penafsiran dan pemberian makna terhadap realitas.

## **8. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis. Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan (Bogdan dan Biklen dalam Imam Gunawan, 2017). Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru (Raco, 2010: 121). Pada tahap ini apabila data yang dikumpulkan belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan proses pengumpulan data lagi. Dengan demikian proses analisis data dilakukan fleksibel pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah *Flow Chart Analysis* atau analisis data mengalir (Miles dan Huberman dalam Samsu, 2017: 105). Pertama, mengumpulkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Kedua, reduksi data. Pada tahap ini akan ada seleksi dan penyederhanaan data yang diperoleh. Teknik ini digunakan supaya data dapat digunakan seefisien mungkin sehingga hanya data yang dianggap perlu dan dinilai valid yang dijadikan sumber penelitian. Ketiga, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi

kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mendapatkan gambaran dan penafsiran dari data yang telah diperoleh serta hubungannya dengan fokus penelitian yang dilaksanakan. Untuk itu, sajian data dapat dibuat dalam bentuk matriks, grafik, tabel, dan sebagainya. Keempat, penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan sesuai dengan data-data yang di peroleh dalam penelitian dan telah di analisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan hasil dialektika antara data lapangan dengan teori pada kerangka konseptual.

## BAB II

### PROFIL KALURAHAN LUMBUNGREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### A. Keadaan Geografi

Kalurahan Lumbungrejo terletak di Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Luas wilayah Kalurahan Lumbungrejo adalah 330,336Ha dengan perincian tanah sawah 167,6625Ha, tanah kering 168,6625Ha, dan tanah keperluan fasilitas umum 3,57Ha. Jarak dari pusat pemerintahan padukuhan/dusun terjauh 3Km, pusat kedudukan ke kapanewon 0,1km, pusat kedudukan ke kabupaten 8km, pusat kedudukan ke provinsi 17km. Secara administratif Kalurahan Lumbungrejo merupakan salah satu wilayah kewenangan dari Kapanewon Tempel di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 10 Padukuhan.

**Gambar 2. 1**



Sumber data: Website Kalurahan Lumbungrejo 2020

Kalurahan Lumbungrejo sebelah utara berbatasan dengan Desa Merdikorejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Margorejo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pondokrejo, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Sungai Krasak/Magelang.

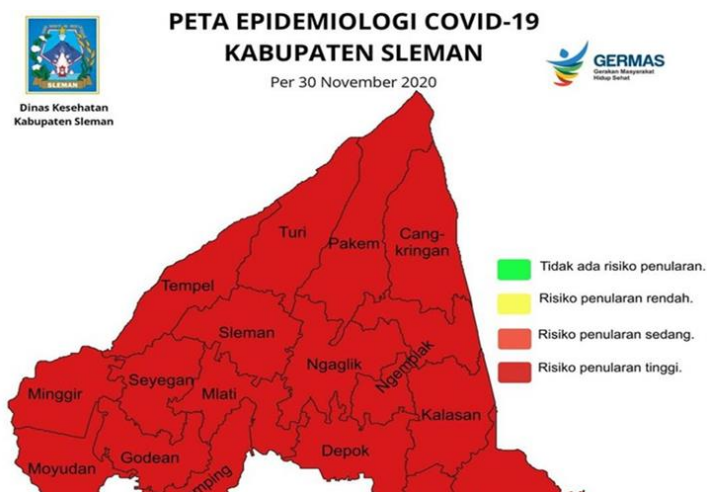
Kalurahan Lumbungrejo adalah dataran tinggi dengan ketinggian 382mdpl dari permukaan laut dan bentangan wilayahnya berupa tanah. Bentuk Wilayah dataran sampai berombak 100% beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober. Adapun kelembaban udara terendah pada bulan Agustus sebesar 74%. Sedangkan tertinggi pada bulan Maret dan November masing-masing sebesar 87%. Suhu udara terendah sebesar 21°C pada bulan Januari dan Nopember, sedangkan suhu udara yang tertinggi 33°C pada bulan September. Dapat dikatakan bahwa pada Maret 2020 saat pandemi Covid-19 iklim tropis di Kalurahan Lumbungrejo menandakan bahwa penyebaran virus korona mejadi terhambat dikarenakan kondisi iklim tropis dapat membuat virus lebih cepat menjadi tidak stabil.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Chen et. al. (2020) dan Sajadi et. al. (2020) menyatakan bahwa kondisi udara ideal untuk virus corona adalah temperatur sekitar 8-10° C dan kelembapan 60-90%. Artinya dalam lingkungan terbuka yang memiliki suhu dan kelembapan yang tinggi merupakan kondisi lingkungan yang kurang ideal untuk penyebaran kasus COVID-19. Para peneliti itu menyimpulkan bahwa kombinasi dari temperatur, kelembapan relatif cukup memiliki pengaruh dalam penyebaran transmisi COVID-19. Demikian pula Araujo dan Naimi (2020) mereka menyimpulkan bahwa iklim tropis dapat membantu menghambat penyebaran virus tersebut. Mereka juga menjelaskan lebih lanjut bahwa terhambatnya penyebaran virus dikarenakan kondisi iklim tropis dapat membuat virus lebih cepat menjadi tidak stabil, sehingga penularan virus Corona dari orang ke orang melalui lingkungan iklim tropis cenderung terhambat, dan akhirnya

kapasitas peningkatan kasus terinfeksi untuk menjadi pandemik juga akan terhambat. (BMKG, 2020)

Berikut peta epidemiologi Covid-19 Kabupaten Sleman

**Gambar 2. 2**



Sumber data: Website Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman

Walaupun Kalurahan Lumbungrejo termasuk iklim tropis namun dapat dilihat pada peta epidemiologi Covid-19 Kabupaten Sleman bahwa seluruh kalurahan di Kabupaten Sleman berwarna merah. Hal ini menunjukkan daerah tersebut mengalami zona merah yang artinya risiko penularan tinggi. Sedangkan Kalurahan Lumbungrejo terletak di Kapanewon Tempel

## **B. Keadaan Demografi**

Keadaan demografi menunjukkan jumlah penduduk Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2022 dan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini

**Tabel 2. 1**

<b>Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah</b>						
No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jiwa	Laki-laki	Perempuan
1	Bibis	4	251	761	389	372
2	Kopen	6	218	700	351	349
3	Krasakan	6	286	831	394	437
4	Kromodangsan	4	292	891	432	459
5	Lodoyong	10	400	1271	632	639
6	Molodono	4	202	638	320	318
7	Ngepos	6	201	576	290	286
8	Sedogan	5	207	681	362	319
9	Tempel	6	291	929	463	466
10	Wonokerso	5	195	576	282	294
<b>Total</b>		<b>56</b>	<b>2541</b>	<b>7854</b>	<b>3915</b>	<b>3939</b>

Sumber data: Website Kalurahan Lumbungrejo 2022

Dari 10 wilayah padukuhan adalah 7854 jiwa dengan 2541 Kepala Keluarga. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan wilayah padukuhan, dan penduduk berdasarkan pendidikan dari belum/tidak sekolah SD, SLTP, SLTA, sampai Perguruan Tinggi.

**Tabel 2. 2 Data Kependudukan berdasar Pendidikan**

<b>Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan</b>							
No.	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	SLTA/Sederajat	2	0.03%	1	0.01%	1	0.01%
2	Diploma IV/Strata I	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
3	SLTP/Sederajat	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
4	Tamat SD/Sederajat	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
5	Belum Tamat SD/Sederajat	1	0.01%	1	0.01%	0	0.00%
6	Akademi/Diploma III/S. Muda	1	0.01%	0	0.00%	1	0.01%
7	Diploma I/II	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	Tidak/Belum Sekolah	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	Strata III	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	Strata II	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>7940</b>	<b>100%</b>	<b>3958</b>	<b>49,85%</b>	<b>3982</b>	<b>50.15%</b>

Sumber data: Website Kalurahan Lumbungrejo 2022

Melalui data jumlah penduduk berdasarkan pendidikan pada Tahun 2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk di Kalurahan Lumbungrejo dari aspek pendidikan cukup berpendidikan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya

masyarakat yang masih melanjutkan pendidikan di SLTA/Sederajat dan Diploma IV/Strata I.

Sejak pandemi Covid-19 masuk di Kalurahan Lumbungrejo banyak warga yang terkonfirmasi positif Covid-19. Berikut adalah rekap data terkonfirmasi positif Covid-19 per padukuhan Kalurahan Lumbungrejo.

**Tabel 2. 3**  
**Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan**  
**Kalurahan Lumbungrejo**  
Tanggal 30 September 2020

No.	Padukuhan	Positif Aktif	Sembuh	Meninggal Dunia	Jumlah Total Terkonfirmasi
1	Bibis	3	23	6	32
2	Molodono	6	51	3	60
3	Tempel	3	60	3	66
4	Lodoyong	3	40	4	47
5	Krasakan	39	115	8	162
6	Wonokerso	2	28	3	33
7	Kromodangsan	2	39	4	45
8	Kopen	4	25	1	30
9	Sedogan	2	49	2	53
10	Ngepos	11	36	5	52
<b>Jumlah</b>		<b>75</b>	<b>466</b>	<b>42</b>	<b>583</b>

Sumber data: Data Premier Kalurahan Lumbungrejo 2022

Rekap data kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per padukuhan Kalurahan Lumbungrejo tanggal 30 September 2020 menunjukkan bahwa disepuluh padukuhan terdapat 75 warga yang positif aktif, 466 sembuh, dan 42 meninggal dunia. Sehingga jumlah total terkonfirmasi ada 583 warga.

**Tabel 2. 4**  
**Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan**  
**Kalurahan Lumbungrejo**  
Tanggal 24 Agustus 2021

No.	Padukuhan	Positif Aktif	Sembuh	Meninggal Dunia	Jumlah Total Terkonfirmasi
1	Bibis	0	21	1	22
2	Molodono	4	49	0	53
3	Tempel	0	58	0	58

4	Lodoyong	1	38	1	40
5	Krasakan	37	109	7	153
6	Wonokerso	0	26	1	27
7	Kromodangsan	0	37	3	40
8	Kopen	0	23	1	24
9	Sedogan	0	47	1	48
10	Ngepos	9	34	3	46
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>442</b>	<b>18</b>	<b>511</b>

Sumber data: Data Premier Kalurahan Lumbungrejo 2022

Pada tabel di atas, berselang hampir satu tahun tercatat di Padukuhan Krasakan dengan jumlah 159 kasus per 831 jiwa per dua minggu pada tanggal 24 Agustus 2021. Angka ini selisih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan catatan kasus di padukuhan lain yang berada di Kalurahan Lumbungrejo.

**Tabel 2. 5**  
**Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19**  
**Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo**  
**Tanggal 07 September 2021**

No.	Padukuhan	Positif Aktif	Sembuh	Meninggal Dunia	Jumlah Total Terkonfirmasi
1	Bibis	2	21	1	24
2	Molodono	1	53	0	54
3	Tempel	4	58	0	62
4	Lodoyong	0	39	1	40
5	Krasakan	1	146	7	154
6	Wonokerso	14	29	3	46
7	Kromodangsan	6	31	3	40
8	Kopen	0	23	1	24
9	Sedogan	0	47	1	48
10	Ngepos	0	43	3	46
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>490</b>	<b>16</b>	<b>538</b>

Sumber data: Data Premier Kalurahan Lumbungrejo 2022

Berikutnya pada tanggal 07 September 2021 Padukuhan Krasakan mencatatkan angka konfirmasi yang masih diurutan tertinggi dan terjadi penambahan kasus menjadi 154 kasus per 831 jiwa. Sedangkan di Padukuhan



Wonokerso terjadi lonjakan dari 27 kasus menjadi 46 kasus per 576 jiwa per dua minggu.

**Tabel 2. 6**  
**Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19**  
**Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo**  
**Tanggal 30 September 2021**

No.	Padukuhan	Positif Aktif	Sembuh	Meninggal Dunia	Jumlah Total Terkonfirmasi
1	Bibis	0	23	1	24
2	Molodono	1	54	0	58
3	Tempel	0	62	0	62
4	Lodoyong	0	39	1	40
5	Krasakan	0	147	7	154
6	Wonokerso	0	74	5	79
7	Kromodangsan	0	37	3	40
8	Kopen	0	23	1	24
9	Sedogan	0	50	1	51
10	Ngepos	0	43	3	46
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>552</b>	<b>22</b>	<b>575</b>

Sumber data: Data Premier Kalurahan Lumbungrejo 2022

Hingga tanggal 30 September 2021 Padukuhan Wonokerso mengalami peningkatan 79 kasus per 576 jiwa per tiga minggu, Untuk Padukuhan Krasakan masih sama dengan tiga minggu sebelumnya yaitu 154 kasus per 831 jiwa.

**Tabel 2. 7**  
**Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19**  
**Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo**  
**Tanggal 22 Februari 2022**

No.	Padukuhan	Positif Aktif	Sembuh	Meninggal Dunia	Jumlah Total Terkonfirmasi
1	Bibis	1	10	0	11
2	Molodono	0	5	0	6
3	Tempel	0	13	0	13
4	Lodoyong	0	1	0	1
5	Krasakan	0	9	0	9
6	Wonokerso	0	8	0	8
7	Kromodangsan	8	0	1	9
8	Kopen	0	11	0	11
9	Sedogan	1	7	0	8

10	Ngepos	0	8	0	8
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>72</b>	<b>1</b>	<b>83</b>

Sumber data: Data Premier Kalurahan Lumbungrejo 2022

Dari data di atas, padukuhan lain masing-masing mencatatkan jumlah terkonfirmasi, seperti Padukuhan Bibis terdapat 24 kasus yang menurun menjadi 11 kasus per 761 jiwa, Padukuhan Molodono terdapat 58 kasus menjadi 6 kasus per 638 jiwa, Padukuhan Tempel terdapat 62 kasus menjadi 13 kasus per 929 jiwa, Padukuhan Lodoyong terdapat 40 kasus menjadi 1 kasus per 1.271 jiwa, Padukuhan Kromodangsan terdapat 40 kasus menjadi 9 kasus per 891 jiwa. Padukuhan Kopen terdapat 24 menjadi 11 per 700 jiwa, Padukuhan Sedogan terdapat 51 kasus menjadi 8 kasus per 681 jiwa, dan Padukuhan Ngepos terdapat 46 kasus menjadi 8 kasus per 576 jiwa per lima bulan pada 22 Februari 2022.

**Tabel 2. 8 Rekap Data Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Padukuhan Kalurahan Lumbungrejo Tanggal 09 Maret 2022**

No.	Padukuhan	Positif Aktif	Sembuh	Meninggal Dunia	Jumlah Total Terkonfirmasi
1	Bibis	6	0	0	6
2	Molodono	5	0	0	5
3	Tempel	11	2	0	13
4	Lodoyong	1	0	0	1
5	Krasakan	8	0	0	8
6	Wonokerso	6	0	0	6
7	Kromodangsan	5	0	1	6
8	Kopen	3	5	0	8
9	Sedogan	6	1	0	7
10	Ngepos	7	0	0	7
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>67</b>

Sumber data: Data Premier Kalurahan Lumbungrejo 2022

Dari data seluruh padukuhan di Kalurahan Lumbungrejo yang terakhir saya lihat jumlah terkonfirmasi mengalami penurunan drastis yaitu positif aktif 58 jiwa, sembuh 8 jiwa, dan meninggal dunia 1 jiwa. Jadi jumlah total terkonfirmasi

ada 67 kasus per 7.854 jiwa per dua minggu pada tanggal 09 Maret 2022. Kenaikan angka penularan Covid-19 di Kalurahan Lumbungrejo pun terlihat tidak menjadi tinggi dibandingkan kondisi pada tahun sebelumnya

### C. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi di Kalurahan Lumbungrejo menunjukkan bahwa agama mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah 7699 orang, Kristen 60 orang, Khatolik 93 orang dan Budha 2 orang. Walaupun Agama Islam menjadi agama mayoritas namun masyarakat Kalurahan Lumbungrejo tetap menjaga toleransi dan sikap kerukunan dengan mewujudkan rasa saling menghormati, menghargai dan membantu antar umat beragama. Sedangkan mata pencaharian penduduk di Kalurahan Lumbungrejo sangatlah beragam yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 9**  
**Daftar Mata Pencaharian Penduduk Kalurahan Lumbungrejo**

<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Belum Bekerja	2930	Petani	89	Buruh Tani	231
Mengurus Rumah Tangga	1448	Industri	2	ART	3
Pensiunan	134	Karyawan Swasta	848	Tukang Cukur	1
ASN	106	Karyawan BUMN	17	Tukang Listrik	1
TNI	27	Karyawan Honorer	29	Tukang Batu	14
POLRI	22	Karyawan BUMD		Tukang Kayu	3
Pedagang	198	Buruh Harian Lepas	1027	Tukang Las	1
Konsultan	2	Perangkat Desa	22	Tukang Jahit	10
Dokter	3	Kepala Desa	1	Mekanik	10
Bidan	4	Wiraswasta	535	Guru	60
Perawat	10	Penata Rias	1	Dosen	4
Apoteker	4	Sopir	55	Lain-lain	16

Sumber data: Profil Kalurahan Lumbungrejo 2022

Dari data diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk di Kalurahan Lumbungrejo bermata pencaharian sebagai buruh lepas dan mengurus rumah tangga. Mata pencaharian buruh lepas yang digeluti oleh masyarakat di Kalurahan Lumbungrejo ini juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan biasanya warga yang tidak tamat sekolah atau hanya tamat SD dan SLTP. Sehingga hal ini menyebabkan keahlian masyarakat Kalurahan Lumbungrejo dalam menggeluti pekerjaan lain sangatlah minim. Pandemi Covid-19 mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kalurahan Lumbungrejo. Kondisi perkenomian mengalami kesulitan dengan jumlah pendapatan yang rendah dan bahkan nihil. Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang bekerja sebagai buruh harian lepas mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pandemi Covid-19 menjadi suatu tantangan. Masyarakat mau atau tidak harus hidup berdampingan dengan jenis virus ini, jika tidak roda perekonomian akan mati. Dalam rangka mempertahankan ekonomi dan ketahanan pangan, masyarakat berinisiatif untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan menanam sayuran dan tanaman lainnya.

#### **D. Budaya**

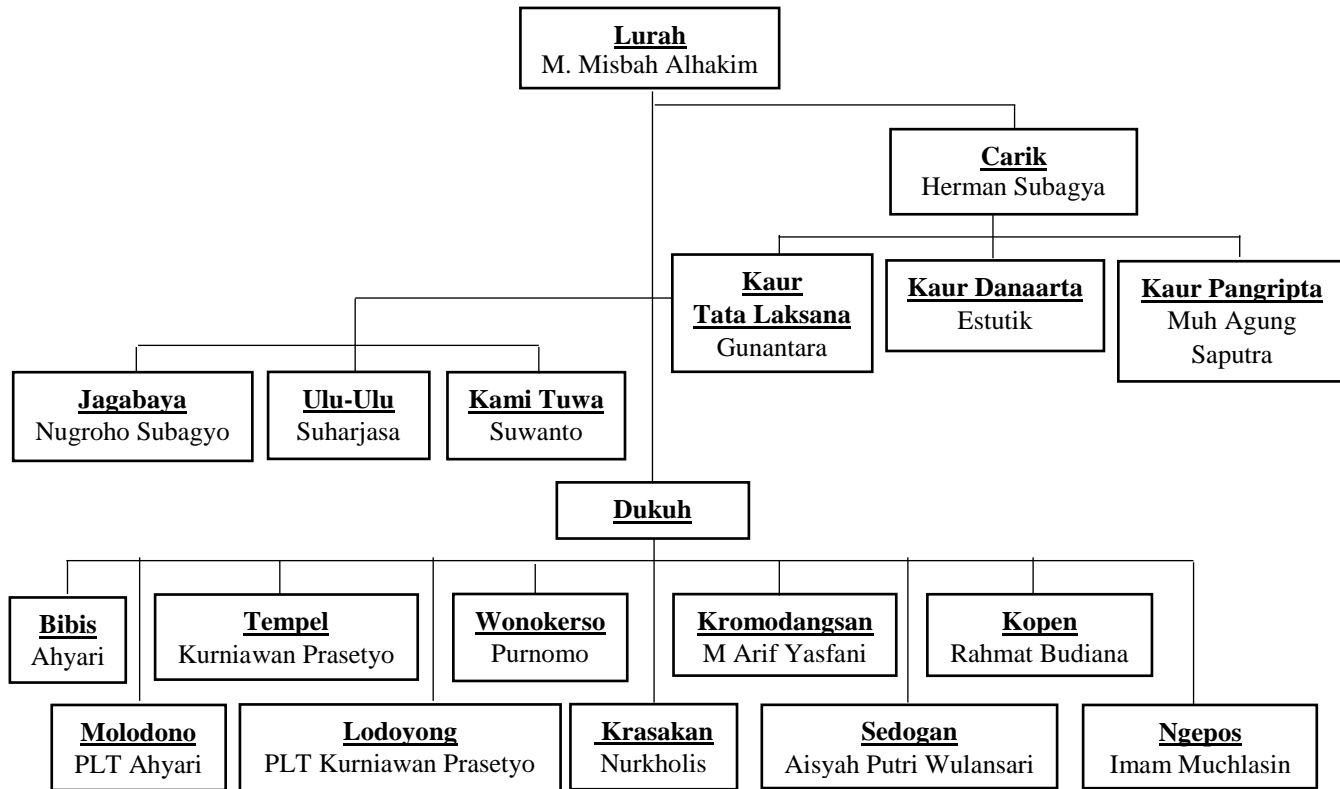
Sebutan istimewa untuk Yogyakarta sebagai daerah otonomi khusus selain memiliki destinasi wisata juga terkenal dengan warisan budaya dan karya seninya. Kalurahan Lumbungrejo memiliki potensi kesenian sebagai warisan budaya Jogja seperti jathilan, rampak buto, laras madyo yang difasilitasi dalam suatu kelompok seni. Selain itu terdapat juga kelompok seni Ibu-Ibu sholawat Ar-Rahmah. Kelompok seni pertunjukan jathilan tersebut sering mengadakan kegiatan seperti festival kesenian terutama bagi hari-hari tertentu yang dianggap sakral bagi

masyarakat setempat. Sekilas informasi kesenian jathilan merupakan kesenian yang telah lama dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Kesenian Jathilan juga dikenal dengan nama kuda lumping, jaran kepang, dan kuda kepang yang berasal dari kalimat berbahasa Jawa “Jarane jan thil-thillan tenan” yang jika dialihkan ke Bahasa Indonesia menjadi “Kudanya benar-benar joget tak beraturan”. Seluruh aktivitas kebudayaan tersebut terhenti pada saat pandemi Covid-19 dengan tujuan menekan laju penularan virus korona.

#### **E. Pemerintahan**

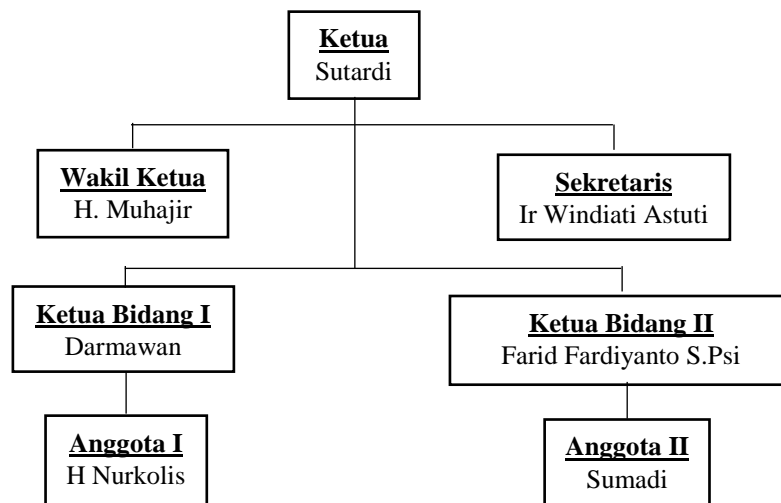
Kantor Kalurahan Lumbungrejo ada di Jalan Magelang Km.18 Tempel Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dipimpin oleh seorang Lurah bernama Bapak M. Misbah Alhakim dengan masa jabatan 2021-2027 yang berasal dari Padukuhan Lodoyong yang mana padukuhan tersebut adalah salah satu padukuhan yang terletak di Kalurahan Lumbungrejo. Visi dari Lurah Kalurahan Lumbungrejo yaitu “Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kalurahan Lumbungrejo yang transformatif dan bermartabat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Sedangkan Misinya adalah *Pertama*, meningkatkan sistim tata kelola Pemerintahan Kelurahan Lumbungrejo yang komunikatif, aspiratif dan partisipatif dengan mengedepankan konsep transparansi dan akuntabel. *Kedua*, Meningkatkan pembangunan dalam bidang infrastruktur, sumber daya manusia, dan digital dengan konsep pembangunan yang berkeadilan. Dan *ketiga*, meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan.

**Gambar 2. 3**  
**Bagan Pamong Kalurahan Lumbangrejo**



Sumber data: Website Kalurahan Lumbangrejo 2022

**Gambar 2. 4 Bagan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Kalurahan**



Sumber data: Website Kalurahan Lumbangrejo 2022

Pada saat pandemi Covid-19 melanda pada awal tahun 2020, Lurah di Kalurahan Lumbungrejo adalah Bapak Imam Suhadi. Beliau menjabat sebagai Lurah periode 2016-2021. Program awal yang diusung dalam penanganan Covid-19 adalah lebih menekankan pada protokol kesehatan. Selain bernegosiasi dengan pihak terkait Bapak Imam lebih sering melakukan negosiasi dengan masyarakat agar bersedia menjadi relawan Covid-19. Sedangkan Bapak Misbah yang menjabat sebagai lurah ketika pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama satu tahun, dalam programnya Beliau lebih menekankan pada pemantauan program-program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah pusat apakah sudah sesuai dan tepat sasaran menjangkau masyarakat Kalurahan Lumbungrejo yang membutuhkan. Beliau juga melakukan negosiasi langsung kepada Wakil Bupati untuk bisa melakukan program penyediaan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) bagi masyarakat Kalurahan Lumbungrejo yang berdampak.

#### **F. Sarana dan Prasarana**

Terdapat beberapa sarana dan prasarana di Kalurahan Lumbungrejo, yang mendukung keberlangsungan jalanya pemerintahan dan roda kehidupan sehari-hari antara lain yaitu:

- 1) Prasarana Pemerintah Desa, yang di dalamnya terdapat 1 buah balai desa, 1 buah kantor desa, tanah bengkok pamong desa berupa sawah dengan luas 23,675Ha dan lain-lain dengan luas 1,218Ha. Serta tanah kas desa/kakurahan berupa tanah sawah 13,0053Ha dan lain-lain dengan luas 1,992Ha.

- 2) Prasarana perairan, terdapat 15 buah Dam yang berfungsi sebagai tempat cadangan air, mencegah terjadinya banjir dan penyedia irigasi terutama untuk sawah di wilayah Kalurahan Lumbungrejo.
- 3) Prasarana/sarana pengangkutan dan komunikasi yaitu lalu lintas melalui darat di 100%.
- 4) Sarana Jalan yaitu terdapat sepanjang 20km jalan desa yang kondisinya masih baik.
- 5) Sarana Perekonomian, Kalurahan Lumbungrejo mempunyai 1 buah Koperasi Simpan Pinjam, 1 buah Koperasi Unit Desa, Pasar umum 1 buah, Pasar bangunan permanen/ semi permanen 1 buah, Jumlah toko 15 buah, Jumlah kios 70 buah Jumlah warung 33 buah, dan Bank 4 buah.
- 6) Sarana sosial budaya, yaitu pendidikan yang didalamnya terdapat 3 TK, 1 Sekolah Dasar Negeri, 1 SD swasta islam dan 1 buah pondok pesantren. Jumlah tempat ibadah terdapat 3 buah masjid, 15 buah mushola dan 1 Gereja Kristen Jawa. Selanjutnya terdapat 10 perkumpulan sanggar kesenian. Selain itu juga terdapat 1 buah Rumah Bersalin/BKIA, 4 orang Bidan, 1 orang Dokter Umum, 2 buah apotek dan 1 buah toko obat.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Text Book*

- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Gunawan, Imam. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hanif, Nurcholis, (2008), *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo: Jakarta.
- Huraerah, Abu & Purwanto. (2006). *Dinamika Kelompok - Konsep dan Aplikasi*. Refika Aditama: Bandung.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, (2001), *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Adicita Karya Nusa: Yogyakarta.
- Jeddawi, Murtir. (2009). *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Kreasi Total Media: Yogyakarta.
- Johnson, Doyle Paul. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jilid 1. Diterjemahkan oleh Robert. M.Z. Gramedia: Jakarta.
- Khairuddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Liberty: Yogyakarta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Ndraha, Talizuduhu. (2000). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta: Jakarta.
- Raco, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo: Jakarta..
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2003). *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media: Jakarta.
- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ritzer, George. (2014), *Teori Sosiologi Modern* Edisi Ketujuh, Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soedijati, (1995), *Solidaritas Dan Masalah Sosial Kelompok Waria*, UPPm STIE: Bandung.
- Soegarda Poerbakawatja. (1981). *Ensiklopedi Pendidikan*. Gunung Agung: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Sugiman, (2018), *Pemerintahan Desa Volume 7*, Bina Mulia Hukum: Jakarta.
- Sugiyono, (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Alfabeta: Bandung.
- Surianingrat, (1992), *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syani. Abdul. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. PT. BumiAksara: Jakarta.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan; Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Widjaja, (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli*, Bulat Dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

## **Jurnal**

- Andriani, K. (2021). Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapipandemicovid-19 Di Desa Pasar Lembu Kabupaten Asahan. *Skripsi. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sumatera Utara
- Basundoro, A. F., & Karunia, L. A. (2021). Anatomi Sekuritisasi Pandemi COVID-19: Komparasi antara Pakistan dan Indonesia. *Jurnal Sentris*, 2 (1), 1-20.
- Butsi. Febry Ichwan. (2019). Memahami Pendekatan Positivis, Konstruktivis Dan Kritis Dalam Metode Penelitian Komunikasi. *E jurnal. Vol. 2 No.1.p.48-55*.
- Eko, S. (2021). Merebut Pemerintah untuk Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Governabilitas* 2(1):194-195.
- Faruk, A. M. Kasanusi, dan Pujiyanti, Y. R. (2021). *National Conference Multidisciplinary*. Perbandingan Kebijakan Penanganan Covid 19 Antara Pemerintah Indonesia, Cina Dan Italia. Universitas Darul Ulum, Indonesia. Universitas Negeri Malang, Indonesia: 305-309.
- Fauziah, Dona. (2017). Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013-2015. *Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau*. Kampus Bina Widya Panam. Pekanbaru.
- Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 508-524.
- Kirigia, J. M., dan Muthuri, R. N. D. K. (2020). The Fiscal Value of Human Lives Lost.

- Krisjuyani, S. (2021). Governability Pemerintah Desa Dalam Menangani Corona Virus Disease 2019 Studi Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Naratif di Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Thesis*. Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
- Made Heny Urmila Dewi, Chafid Fandeli, dan M. Baiquni. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Parisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali.
- Mantovani, R. (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Makassar. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Mindarti, L. I. dan Nabil, P. (2019). Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Desmigratif, *Public Administration Journal*, 1 (4), 333-346
- Norma, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan) (*Doctoral dissertation*, UIN Raden Intan Lampung).
- Pratiwi, D. K. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 37-52.
- Sa'diyah. (2016). Gambaran Psychological Well Being dan Stress Pengasuhan ibu dengan anak autis. *Prosiding Seminar ASEAM 2nd Psychology and Humanity*.
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development). Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Suharto, R. M. C., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Di Kota Binjai Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Karantina Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Viruses Diseases 2019 (Covid-19) Di Kota Binjai. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 744-767.
- Supriyanto, (2014). Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Uptd Dinas Perhubungan Informasi Dan Komunikasidi Kabupaten Kampar). *Jom FISIP*. 1:1-13.

## Internet

- Atmowusito, D. R. (2020). Teknokrasi Jelas Masih Perlu tapi Bukan Versi Orde Baru. Redaksi Website. [www.politik.brin.go.id](http://www.politik.brin.go.id) diakses 7 Desember 2022
- Dewa, H. 2021. Apa Perbedaan Kebebasan yang Ada di Indonesia dan Amerika Serikat? <https://kumparan.com/handika-dewa/apa-perbedaan-kebebasan-yang-ada-di-indonesia-dan-amerika-serikat-1wEBX8tpxzA/full> diakses 19 Januari 2022.
- Eko, S, (2020), Memahami Pemerintahan.  
<file:///C:/Users/user/Downloads/Memahami%20Ilmu%20Pemerintahan%20-%20Mazhab%20Timoho%205G.pdf> diakses 22 Januari 2022
- Gischa, S. 2019. Bentuk Solidaritas: Mekanik dan Organik. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/190000069/bentuk-solidaritas-mekanik-dan-organik?page=all> diakses 21 Januari 2022
- Indonesia, CNN. 2021. Cara Biden Turunkan Kasus Infeksi Virus Corona di AS. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210216192137-134-607043/cara-biden-turunkan-kasus-infeksi-virus-corona-di-as>, diakses 2 Januari 2022.
- Shihab, N. dr. (2020). Covid-19: Kupasan Ringkas Yang Perlu Anda Ketahui (M. Nadhifah (Ed.); 1st ed.). Literati Imprint dari Penerbit Lentera Hati. <https://books.google.co.id/books?id=5srlDwAAQBAJ&pg=PA38&dq=pemeriksaan+covid&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwif9OfmhLvuAhVhZjgGHZX8AyMQ6AEwA3oECAUQA#v=onepage&q=pemeriksaan+covid&f=false>
- Septiani, A.2021. Warga China 'Teriak' Akan Mati Kelaparan Imbas Lockdown. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5875590/warga-china-teriakan-mati-kelaparan-imbis-lockdown> diakses 2 Januari 2022
- Kamil, Isnawan, L., Sukman, H., Rahma, F., & Sartika, D. (2020). Bersama Melawan Covid-19 (I. Haq (ed.); 1st ed.). IAIN Parepare Nusantara Press. <https://books.google.co.id/books?id=Rk4CEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pencegahan+covid19&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjzNnB0r3uAhVL4zgGHfUpCBo4ChDoATADegQIABAC#v=onepage&q=pencegahan+covid-19&f=false>
- Kemp, Luke. (2021). Ketika Pemerintah Menyalahgunakan Kekuasaan Darurat Ketia Pandemi Covid-19. BBC Future. [www.bbc.com](http://www.bbc.com) diakses 7 Desember 2022
- MPR UNAS. (2020). Potret Politik Global Pasca Pandemi Covid-19 Antara Kepentingan, Persaingan dan Babak Baru. UNAS. [www.unas.ac.id](http://www.unas.ac.id) diakses 7 Desember 2022
- Prisitya, A. 2020. Demonstrasi Tolak Lockdown Berlangsung di Amerika Serikat dan Brazil, Pemimpin Negara Ikut Bergabung.

<https://www.tribunnews.com/internasional/2020/04/20/demonstrasi-tolak-lockdown-berlangsung-di-amerika-serikat-dan-brazil-pemimpin-negara-ikut-bergabung> diakses 22 Desember 2022

Putro, W. D. (2020). Pandemi dan Pendekatan Keamanan. detikNews. [www.news.detik.com](http://www.news.detik.com) diakses 7 Desember 2022

Reuters. (2021). Banyak Penyebab, Kualitas Demokrasi di Dunia Saat ini Makin Merosot. BusinessInsight. diakses 7 Desember 2022

Syandi, M. 2020. *Arti Pentingnya Pembangunan Masyarakat di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. ACAMEDIA. Yogyakarta.

WHO, 2022. Coronavirus (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/table> diakses 18 Januari 2022

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Depdiknas. (2007). *Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdiknas.

Depkes RI. (1997). *Pedoman Pengelolaan Rekam Medis Rumah Sakit Di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI. From Coronavirus Disease (COVID-19) in China. BMC Research Notes, 13(1), 1–5.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*. Maret. Jakarta Pusat.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *Merekam Pandemi COVID-19 Dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Mei. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000. *Formasi Pegawai Negeri Sipil Presiden Republik Indonesia*.